



**PANDUAN
MASYARAKAT TENTANG
SUBSIDI ENERGI DI
INDONESIA
PERKEMBANGAN TERAKHIR 2012**



DISUSUN OLEH INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT'S
GLOBAL SUBSIDIES INITIATIVE DAN INSTITUTE FOR ESSENTIAL SERVICES REFORM WWW.IISD.ORG



Daftar Isi

1. Sekilas mengenai subsidi energi di Indonesia	4
1.1 Apa yang dimaksud dengan subsidi energi?	6
1.2 Mengapa subsidi energi?	6
1.3 Subsidi energi di Indonesia	7
1.3.1 Bahan bakar minyak (BBM)	7
1.3.2 Listrik	12
1.3.3 Batubara	13
1.3.4 Subsidi minyak dan gas alam sektor hulu	14
2. Apakah subsidi energi baik untuk masyarakat Indonesia?	16
2.1 Apakah subsidi energi menguntungkan rakyat miskin?	16
2.2 Apakah subsidi energi berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi?	19
2.2.1 Peningkatan impor energi	19
2.2.2 Ketidakstabilan harga minyak dan pembiayaan negara	20
2.2.3 Penanaman modal	21
2.2.4 Persaingan	22
2.2.5 Korupsi dan penyelundupan	22
2.3 Apa dampak subsidi energi terhadap lingkungan?	23
2.4 Apa rencana pemerintah tentang reformasi subsidi energi?	24
2.5 Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan jika subsidi energi dihapuskan?	25
3. Apa yang kita ketahui tentang reformasi subsidi energi	28
3.1 Mekanisme harga dan struktur pajak	28
3.2 Meredam dampak sosial dan ekonomi	30
3.3 Membangun strategi reformasi	37
3.3.1 Tata kelola	37
3.3.2 Komunikasi	38
3.3.3 Pengawasan dan penyesuaian	38
3.4 Kesimpulan	39
4. Catatan akhir	40
5. Daftar pustaka	41
Ucapan terima kasih	48

iisd

International
Institute for
Sustainable
Development

Institut
international du
développement
durable

IISD memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan sejumlah rekomendasi kebijakan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan dan penanaman modal internasional, kebijakan ekonomi, perubahan iklim dan energi, pengukuran dan penilaian, manajemen sumber daya alam, serta peran teknologi komunikasi dalam mendukung semua hal di atas. Kami melaporkan berbagai perkembangan mengenai perundingan-perundingan internasional dan mensosialisasikan pengetahuan yang didapat melalui proyek-proyek kerjasama, yang menghasilkan berbagai bentuk penelitian yang tepat, pengembangan kapasitas di negara-negara berkembang, dan jaringan di kalangan para peneliti, praktisi, warga negara dan pembuat kebijakan di Utara dan Selatan yang lebih baik.

Visi IISD adalah kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak – secara berkelanjutan; misinya adalah memperjuangkan inovasi, yang memungkinkan masyarakat dunia untuk hidup secara berkelanjutan. IISD terdaftar sebagai organisasi amal di Kanada dan memiliki status 501(c)(3) di Amerika Serikat. IISD menerima dukungan utama untuk operasinya dari Pemerintah Kanada, yang pendanaannya dilakukan melalui Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA – *Canadian International Development Agency*), Pusat Penelitian Pembangunan Internasional (IDRC – *International Development Research Centre*) dan Lingkungan Kanada (*Environment Canada*), serta Propinsi Manitoba. Lembaga kami juga menerima dukungan dana proyek dari berbagai pemerintahan di dalam dan luar Kanada, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yayasan dan sektor swasta.

IISD

161 Portage Avenue East
6th Floor
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700

International Environment
House 2
9 chemin de Balexert
1219 Châtelineau
Geneva, Switzerland
Tel: + (41-22) 917-8683



GSI Global
Subsidies
Initiative

www.iisd.org/gsi

SEKILAS MENGENAI SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA



1. Sekilas mengenai subsidi energi di Indonesia

Sebagaimana dilakukan di berbagai negara, selama puluhan tahun pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi guna mencapai sejumlah sasaran sosial dan ekonomi. Kebijakan ini kerap ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, seiring semakin tingginya kebutuhan lain yang harus diurus oleh pemerintah, menentukan alokasi sumber daya keuangan publik menjadi salah satu tugas pemerintah yang paling penting dan sulit.

Masyarakat memiliki andil besar atas kebijakan-kebijakan subsidi. Sayangnya, masih sedikit perdebatan publik yang berkembang mengenai hal-hal apa saja yang dapat disubsidi. Sebagian masalah ini disebabkan oleh informasi yang tidak terbuka: dalam banyak kasus, informasi mengenai subsidi seringkali tersembunyi dan amat sulit untuk dilacak. Di sisi lain, masalah ini juga seolah tenggelam oleh kesibukan masyarakat mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi setiap kegiatan pemerintah.

Bagaimanapun juga, jika subsidi memang dapat menghasilkan manfaat nyata, maka seharusnya dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap pengeluaran pemerintah – suatu tugas yang sebagian besar harus dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil dan jurnalis, yang menjadi sasaran utama panduan ini.

Pada bagian selanjutnya, panduan ini akan menjabarkan informasi terbaik yang dapat dikumpulkan terkait biaya dan manfaat penerapan subsidi energi. Lalu, mengapa memberikan perhatian terhadap subsidi energi? Pertama, subsidi bahan bakar dan listrik menyerap dana yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Pemerintah bahkan menghabiskan lebih banyak dana untuk subsidi bahan bakar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur publik (lihat Kotak 1). Kedua, subsidi memiliki dampak besar terhadap kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang merupakan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Bagian pertama dari panduan ini mengulas bagaimana cara berbagai jenis energi disubsidi di Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai dampak subsidi-subsidi tersebut terhadap berbagai aspek pembangunan berkelanjutan. Bagian ketiga membahas mengenai proses reformasi subsidi energi, menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia di masa lalu, serta menjabarkan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman negara-negara lain.

Kotak 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 mengalokasikan sebesar Rp202 Triliun, atau US\$22 miliar, untuk subsidi bahan bakar dan listrik. Jumlah ini lebih tinggi daripada anggaran untuk pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial secara keseluruhan. Anggaran yang direncanakan untuk 2013 memperkirakan bahwa anggaran untuk subsidi energi akan membengkak mencapai Rp275 Triliun (US\$20 miliar), atau 24 persen dari total pengeluaran yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

Tabel 1 » Pengeluaran pemerintah pusat dan subsidi, 2006-2013
(dalam triliun rupiah)

	2006 LKPP	2007 LKPP	2008 LKPP	2009 LKPP	2010 LKPP	2011 LKPP	2012 APBN-P	2013 RAPBN
Belanja pemerintah pusat	440	505	693	629	697	884	1.070	1.139
Total subsidi	107	150	275	138	193	295	245	316
• Subsidi energi	95	117	223	95	140	256	202	275
– Subsidi bahan bakar minyak	64	84	139	45	82	165	137	194
– Subsidi listrik	30	33	84	50	58	90	65	81
Belanja modal	55	64	73	76	80	118	169	194
Pengeluaran Pemerintah pusat untuk beberapa sektor								
Pertahanan	24	31	9	13	17	51	72	78
Pendidikan	45	51	55	85	91	98	104	109
Kesehatan	12	16	14	16	19	14	16	17
Perlindungan sosial	2	3	3	3	3	4	6	7

Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.a.), Kementerian Keuangan (n.d.b.), Kementerian Keuangan (n.d.c).

1.1 Apa yang dimaksud dengan subsidi energi?

Umumnya, subsidi energi dapat didefinisikan sebagai “berbagai bentuk tindakan pemerintah yang bertujuan menurunkan biaya produksi energi, meningkatkan pendapatan produsen energi atau mengurangi biaya yang dibayar oleh konsumen energi” (IEA et al., 2010). Subsidi energi dibagi menjadi dua kategori: subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, yang disebut sebagai **subsidi konsumen**, dan subsidi yang bertujuan mendukung produksi domestik, atau **subsidi produsen** (Burniaux et al., 2009, dalam Ellis, 2010).

Dalam pelaksanaannya, subsidi energi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk. OECD/IEA & UNEP (2002) dan UNEP (2008) mengidentifikasi berbagai mekanisme umum yang biasa digunakan banyak pemerintah untuk mendukung produksi dan konsumsi energi, termasuk:

- Pemberian dana langsung: pemberian uang tunai kepada konsumen, produsen, bunga rendah atau hutang preferensial, dan jaminan hutang pemerintah;
- Perlakuan pajak secara khusus: kredit pajak, potongan pajak, pembebasan royalti, bea cukai atau tarif, pengurangan pajak, penangguhan pajak, dan percepatan depresiasi untuk perlengkapan pasokan energi;
- Hambatan perdagangan: tarif, kuota impor dengan hambatan tarif dan non-tarif;
- Jasa terkait energi yang diberikan langsung oleh pemerintah dengan biaya yang lebih murah, seperti infrastruktur energi, penelitian dan pengembangan publik;
- Pengaturan sektor energi: jaminan permintaan, kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja tertentu, pengendalian harga, peraturan tentang lingkungan, dan hambatan akses pasar.

1.2 Mengapa subsidi energi?

Para pembuat kebijakan sering membenarkan pemberian subsidi energi dengan alasan bahwa hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjamin keamanan pasokan energi (IEA et al., 2010). Subsidi memang dapat menjadi kebijakan penting untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan mengatasi kegagalan sistem pasar. Akan tetapi, ada resiko yang berhubungan dengan penggunaan subsidi energi. Harga yang direayasa agar menjadi rendah dapat berdampak buruk terhadap pelestarian energi, dan pemberian subsidi terhadap bahan bakar fosil merupakan hambatan untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Selain itu, manfaat subsidi energi biasanya dinikmati oleh golongan atas, karena merekalah yang biasanya mengkonsumsi sebagian besar energi. Dampak-dampak di atas dan dampak lain dari subsidi energi akan dibahas lebih rinci pada bagian kedua panduan ini.

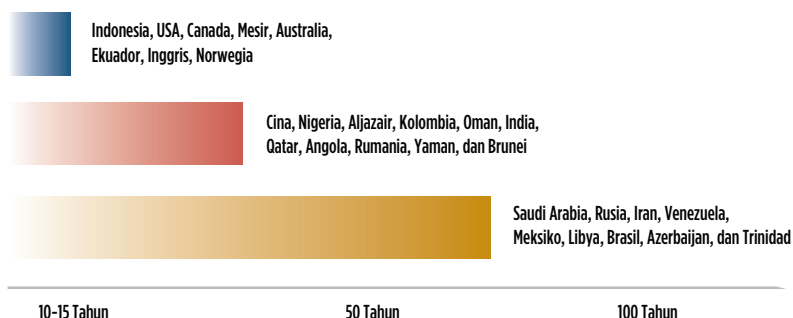
1.3 Subsidi energi di Indonesia

1.3.1 Bahan bakar minyak (BBM)

Indonesia menggunakan mekanisme subsidi guna menekan harga eceran bahan bakar sejak 1967 (Dillon et al., 2008). Pada era 1980-an, ketika produksi minyak Indonesia lebih tinggi dibanding saat ini, subsidi bahan bakar lebih terjangkau, meskipun hal ini banyak menuai kritik karena subsidi energi mengganggu sistem perekonomian secara keseluruhan. Ketika harga minyak dunia meningkat pada 2005, pemerintah menghabiskan 24 persen dari pengeluaran totalnya untuk subsidi, dan dari jumlah tersebut, 90 persennya dihabiskan untuk produk-produk bahan bakar (World Bank, 2007). Guna mengurangi pengeluarannya, pemerintah meningkatkan harga minyak tanah, bensin dan diesel di dalam negeri dua kali dalam kurun enam bulan pada 2005. Peningkatan harga pertama kali dilakukan pada Maret sebesar 29 persen (untuk harga bahan bakar), sementara yang kedua pada Oktober sebesar 114 persen (World Bank, 2007).

Produksi minyak mentah Indonesia menurun sejak 1998 seiring menuanya umur sumur-sumur minyak terbesar di Indonesia. Pada 2004 Indonesia menjadi net importir minyak dan tidak lama setelah itu pemerintah menanggungkan keanggotaannya di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC – *Organization of Petroleum Exporting Countries*) (EIA, 2011). Pada 2011, badan pengatur minyak dan gas bumi sektor hulu, BP Migas, memperkirakan cadangan minyak potensial dan terbukti hanya akan bertahan sampai 12 tahun, sedangkan untuk gas alam hanya bertahan sampai 46 tahun (BP Migas, 2011).

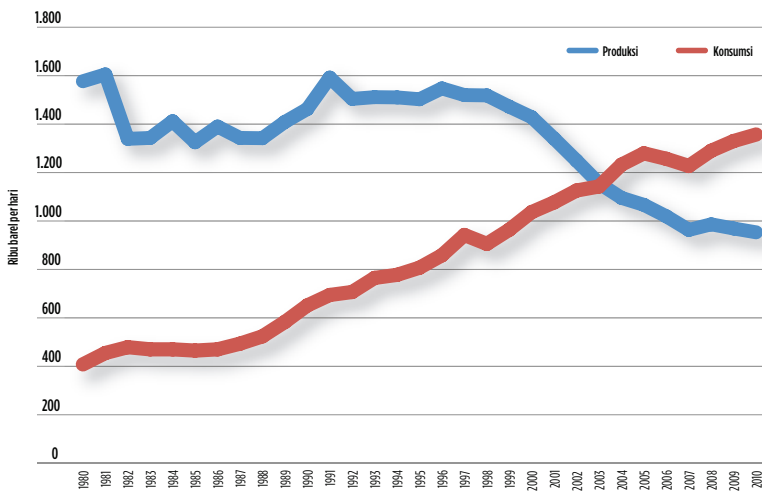
Diagram 1 » Pebandingan cadangan minyak dengan sejumlah negara



Sumber: Harun (2011).

Pada saat bersamaan, konsumsi minyak Indonesia telah meningkat secara bertahap (lihat Diagram 2). Perubahan status dari pengeksport minyak menjadi pengimpor minyak, dan perbedaan yang semakin melebar antara tingkat produksi dan konsumsi, telah membuat subsidi bahan bakar menjadi beban yang serius dalam anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir.

Diagram 2 » Tingkat produksi dan konsumsi minyak Indonesia, 1980-2010



Sumber: Index Mundi (n.d.a), Index Mundi (n.d.b).

Besin “Premium” Dan diesel “Solar”

Pemerintah Indonesia menyubsidi dua dari empat bahan bakar utama di sektor transportasi Indonesia. Harga bahan bakar jenis Premium dan Solar dipatok di bawah harga pasar oleh pemerintah dan hanya berubah sesekali saja tanpa jangka waktu yang teratur. Premium dan Solar didistribusikan oleh Perusahaan Minyak Nasional (Pertamina), sedangkan bahan bakar dengan kadar oktan yang lebih tinggi, yakni Pertamax dan Pertamax Plus (atau produk yang setara), disediakan oleh Pertamina dan beberapa perusahaan multinasional dengan harga yang disesuaikan secara berkala dengan perkembangan harga minyak internasional (sebagai contoh, Pertamina biasanya memperbarui harga Pertamax dua kali dalam tiap bulan). Saat ini, Pemerintah tidak lagi mensubsidi bahan bakar untuk sektor industri.

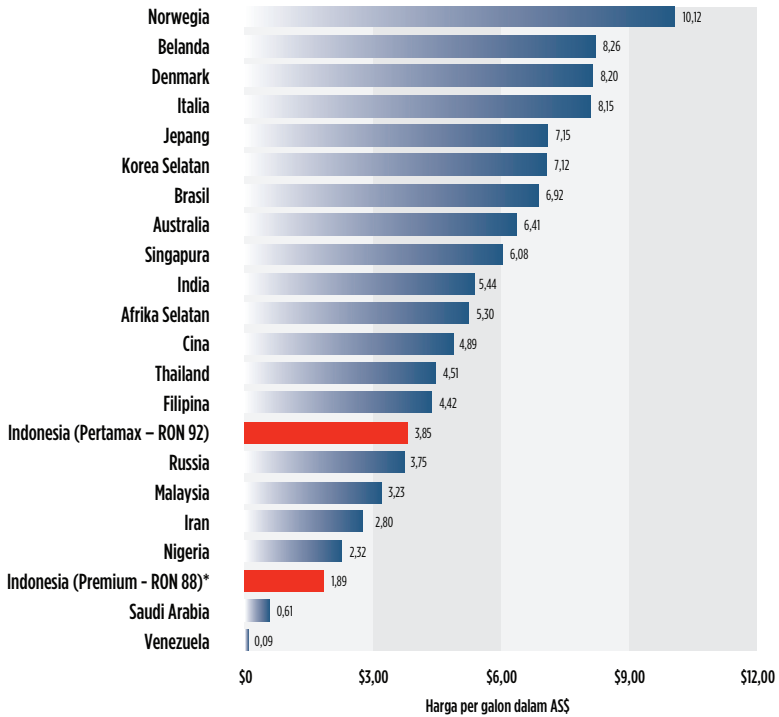
Tabel 2 » Harga produk-produk BBM di Indonesia

Jenis BBM	Angka RON	Harga per liter*	Perubahan Harga Terakhir	Kuantitas Penjualan Pertamina (2011)
Pertamax Plus	RON 95	Rp9.550	Maret 2012	(tidak dipublikasikan)
Pertamax	RON 92	Rp9.200	Maret 2012	1,4 juta kiloliter
Premium	RON 88	Rp4.500	2009	25,5 juta kiloliter
Solar (diesel)	–	Rp4.500	2009	14,5 juta kiloliter

Sumber: Media Indonesia (2012); Kompas (2012a).

Harga bahan bakar di Indonesia termasuk salah satu yang termurah di dunia. Negara-negara lain dengan harga yang paling rendah adalah negara-negara pengekspor minyak (lihat Diagram 3). Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia adalah negara dengan harga bahan bakar bersubsidi yang paling murah. Meskipun Premium adalah bahan bakar yang paling rendah kualitasnya (RON 88), Premium adalah jenis bahan bakar minyak yang paling banyak dikonsumsi oleh banyak masyarakat di Indonesia (lihat Tabel 2).

Diagram 3 » Perbandingan harga BBM sejumlah negara



* Tambahan dari penyusun.
 Sumber: Bloomberg (2012).

Minyak tanah

Pemerintah Indonesia mengatur harga minyak tanah, dan mempertahankan harga ecerannya di bawah harga pasar. Di Indonesia, minyak tanah terutama digunakan untuk memasak dan penerangan. Pada 2006, pemerintah menganggarkan Rp31,5 triliun (US\$3,5 miliar) untuk subsidi minyak tanah, Rp36,5 triliun (US\$4 miliar) pada 2007 dan Rp38 triliun (US\$3,8 miliar) pada 2008. Pada 2007, pemerintah memperkenalkan program konversi minyak tanah ke gas, yang telah berhasil mengurangi subsidi minyak tanah.

Gas elpiji

Menghadapi tekanan fiskal yang disebabkan oleh tingginya subsidi minyak tanah, pemerintah Indonesia meluncurkan program pengalihan minyak tanah ke elpiji untuk mengurangi subsidi minyak tanah pada 2007. Program ini menyediakan paket perdana yang terdiri dari tangki elpiji 3 kg, kompor elpiji dan kelengkapannya (regulator dan selang). Pada awalnya program tersebut direncanakan dapat menjangkau 42 juta rumah tangga dan perusahaan kecil pada 2012 dan menggantikan lebih dari 6 juta kiloliter minyak tanah per tahun. Target ini kemudian ditingkatkan menjadi 48 juta paket perdana.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa total biaya untuk mendistribusikan 46 juta paket perdana elpiji 3 kg dari 2007 hingga 2011 mencapai Rp14,11 triliun (US\$1,56 miliar). Akan tetapi, menurut Evita Legowo, Direktur Jendral Minyak dan Gas pada Kementerian ESDM, pengurangan subsidi minyak tanah yang dihasilkan akan menghemat Rp35,34 triliun (US\$3,9 miliar) (Investor Daily Indonesia, 2011). Paket perdana elpiji dan distribusinya ditanggung oleh anggaran negara. Pada akhir 2010, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri tentang penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk-produk tangki elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah (Kementerian Keuangan, 2010a).

Selain pemberian paket perdana gratis, pemerintah juga menyubsidi harga elpiji 3 kg. Pada 2007, Kementerian ESDM memperkirakan bahwa biaya produksi satu kilogram elpiji adalah Rp6.700. Harga subsidi (sebelum pajak) untuk elpiji 3 kg adalah Rp3.500 per kg, yang berarti setiap kilogram elpiji disubsidi sebesar Rp3.200 (ESDM 2007).

**Tabel 3 » Perkembangan program konversi minyak tanah ke LPG
(dalam juta kiloliter)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBN-P
Minyak Tanah	9,85	8,47	4,78	2,35	1,69	1,70
LPG	-	0,51	1,77	2,69	3,26	3,61

Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.c).

Sejak diterapkannya program konversi, jumlah konsumsi minyak tanah bersubsidi berangsur menurun. Indonesia berhasil mengurangi jumlah minyak tanah bersubsidi menjadi 1,69 juta kiloliter pada 2011 dari 9,85 juta kiloliter pada 2007. Pemerintah menyatakan bahwa peralihan secara kumulatif telah menghemat Rp45,3 triliun (US\$5,2 miliar) sejak 2007 hingga 30 April 2011. (ESDM, 2012)

1.3.2 Listrik

Pemerintah Indonesia menetapkan tarif listrik untuk seluruh jenis konsumen (contohnya: industri, bisnis, rumah, dan layanan publik). Besarnya subsidi ditentukan pemerintah setiap tahun dan didasarkan pada perbedaan antara rata-rata biaya produksi listrik yang diajukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan rata-rata tarif listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Rata-rata biaya produksi listrik didasarkan pada perkiraan komposisi pasokan energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan listrik dan menjalankan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan biaya pasokan, serta selisih keuntungan untuk PLN.

Tabel 4 » Subsidi listrik di Indonesia 2007–2013 (dalam triliun rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 APBN-P
Subsidi listrik	33,07	83,91	49,55	57,60	90,45	64,97

Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.c)

Subsidi listrik melonjak dari Rp9 triliun (US\$0,9 miliar) pada 2005 menjadi Rp31 triliun (US\$3,4 miliar) pada 2006 karena meningkatnya harga minyak mentah internasional dan konsumsi diesel pada pembangkitan listrik. Subsidi listrik mencapai puncaknya pada 2011 dengan total Rp90 triliun (US\$9 miliar).

1.3.3 Batubara

Pemerintah Indonesia menyubsidi batubara melalui dua cara: dengan menjamin pasokan kepada perusahaan listrik negara, atau PLN, dan industri domestik, dan dengan mengatur harga batubara domestik.

Subsidi batu bara disediakan melalui kebijakan Kewajiban Pasar Domestik (*Domesic Market Obligation*), yang menjamin pasokan batubara untuk keperluan pembangkitan listrik dan industri dalam negeri. Formulasi penghitungan Kewajiban Pasar Domestik ditentukan oleh pemerintah dengan menimbang jumlah batubara yang dibutuhkan oleh konsumen domestik untuk memenuhi kebutuhan operasional tahunan mereka.

Kewajiban Pasar Domestik didistribusikan secara proporsional kepada perusahaan-perusahaan batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kontraktor pertambangan batubara yang telah disetujui oleh pemerintah. Kuota tersebut kemudian dihitung kembali dan ditetapkan setiap tahunnya dengan jumlah yang mencerminkan perubahan permintaan dan pasokan batu bara pada saat itu. Sebagai contoh, Kewajiban Pasar Domestik batubara pada 2010 adalah 70 juta ton, dan pada 2011 mencapai 60,15 juta ton (Kontan, 2012).

Selain kebijakan Kewajiban Pasar Domestik, pemerintah juga menetapkan Harga Patokan Batubara Indonesia. Penetapan harga ini bertujuan untuk mengamankan pasokan batu bara domestik, dan berfungsi sebagai harga patokan bagi para produsen dan konsumen domestic. Selain itu, penetapan harga tersebut juga dilakukan guna memaksimalkan pendapatan negara dari sektor batubara. Harga Patokan Batubara Indonesia ini membuat harga batu bara relatif seragam. Prosedur untuk menetapkan patokan harga tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 17 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara. Penentuannya berdasar pada rumus dan sejumlah ciri yang dapat membuat harga domestik di bawah indeks pasar batu bara internasional lainnya, seperti *Global Coal* dan *Barlow Jonker*¹

Konsumen utama bahan bakar batu bara di Indonesia adalah PLN. Perusahaan negara ini mengkonsumsi lebih dari 80 persen pasokan batu bara domestik atau sekitar 34 juta ton pada 2010, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh industri domestik, seperti baja dan semen.

1.3.4 Subsidi minyak dan gas alam sektor hulu

Pemerintah menyediakan sejumlah subsidi untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas dalam bentuk insentif pajak, pinjaman kredit penanaman modal, dan kewajiban pasar minyak domestik. Braithwaite et al. (2010) memperkirakan bahwa, pada 2008 saja, produsen minyak dan gas menerima sekitar Rp2,37 triliun (US\$245 juta) dalam bentuk kredit penanaman modal dan insentif pajak. Selain itu, kilang minyak Pertamina diuntungkan dengan pembelian minyak mentah yang dipasokkan ke perusahaan negara tersebut melalui sistem kewajiban pasar domestik minyak dengan potongan harga yang cukup besar. Subsidi yang diberikan ke Pertamina oleh pemerintah pada 2008 bernilai Rp15 triliun (US\$1,55 miliar), yang membuat jumlah total subsidi yang diberikan pemerintah ke produsen minyak dan gas hulu bernilai sebesar Rp17 triliun (US\$1,8 miliar) pada tahun yang sama. Kajian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi subsidi lainnya. Sayangnya, informasi yang diperlukan guna mengklarifikasi dan memperkirakan nilai subsidi-subsidi tersebut tidak begitu banyak tersedia.



2

**APAKAH SUBSIDI ENERGI BAIK
BAGI MASYARAKAT INDONESIA?**



2. Apakah subsidi energi baik bagi masyarakat Indonesia?

Pemerintah Indonesia mensubsidi BBM dan listrik agar harga energi dapat dijangkau, khususnya oleh kalangan berpendapatan rendah (Kementerian Keuangan, 2010b). Subsidi energi ditujukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat melalui dua cara. Dampak langsungnya adalah, dengan mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk BBM, masyarakat akan memiliki sisa pendapatan yang lebih besar untuk keperluan lain. Sementara itu, dampak tidak langsung penerapan subsidi energi adalah lebih mudahnya biaya barang dan jasa yang dapat dibeli oleh masyarakat karena subsidi menekan biaya-biaya energi yang harus dikeluarkan produsen, distributor, dan penyedia layanan.

2.1 Apakah subsidi menguntungkan rakyat miskin?

Data dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat subsidi justru dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi (golongan atas atau mampu). Karena subsidi bahan bakar dijalankan berdasarkan hitungan liter, dan tidak didasarkan pada perbedaan penghasilan, maka kalangan yang paling banyak menggunakan bahan bakarlah yang paling mendapatkan manfaat paling banyak dari subsidi. Konsumen energi terbesar adalah masyarakat golongan atas dan masyarakat di daerah perkotaan.

Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009, World Bank (2011) menunjukkan bahwa keperluan rumah tangga dan pribadi mengkonsumsi sepertiga dari total subsidi BBM. Dua pertiga sisanya tersalur ke penggunaan transportasi komersial dan kegiatan usaha (lihat Diagram 4). Kajian tersebut juga menemukan bahwa kalangan masyarakat atas yang berpenghasilan tinggi mengkonsumsi 84 persen bensin bersubsidi, dengan sepersepuluh kalangan terkaya mengkonsumsi hampir 40 persen dari total BBM bersubsidi. Sebaliknya, sepersepuluh kalangan termiskin tercatat hanya mengkonsumsi kurang dari 1 persen total BBM bersubsidi. Analisis lebih mendalam atas data survei sektor rumah-tangga juga menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga kalangan miskin dan hampir miskin (didefinisikan sebagai sepersepuluh dari lima terbawah) tidak mengkonsumsi bensin sama sekali.

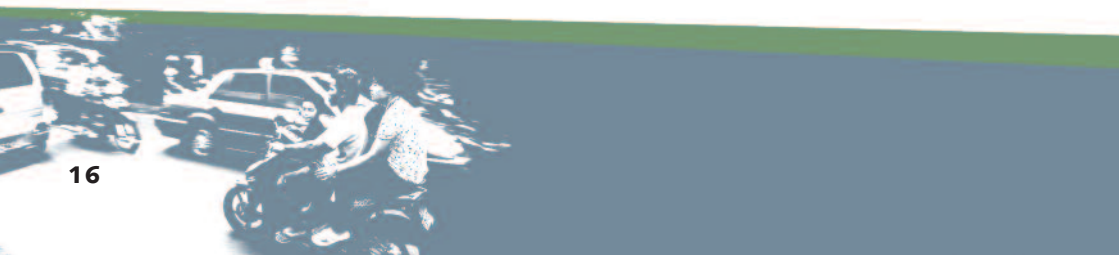
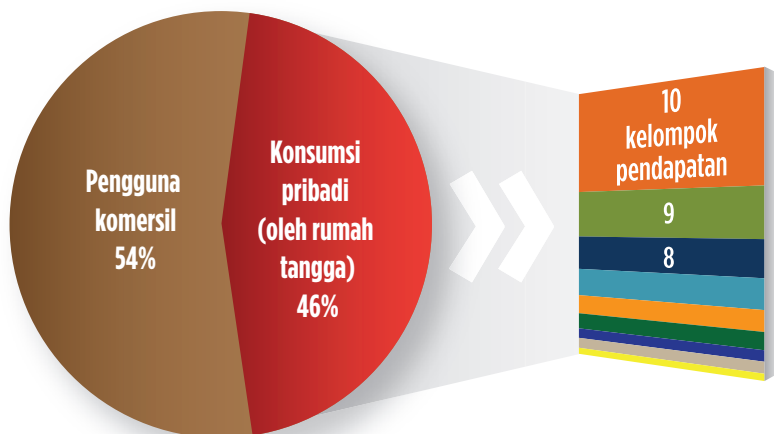


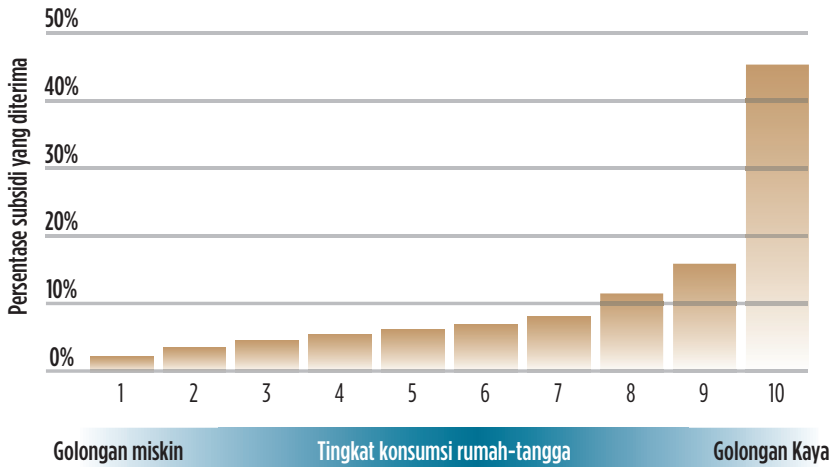
Diagram 4 » Konsumsi bahan bakar bersubsidi oleh sektor komersial dan pribadi



Sumber: World Bank (2011: 27).

Hasil serupa ditemukan dalam kajian lain yang dilakukan oleh Agustina et al. (2008). Kajian tersebut menemukan bahwa hampir 90 persen subsidi BBM di Indonesia menguntungkan 50 persen kalangan terkaya (Diagram 5). Pemerintah Indonesia memahami situasi ini. Kementerian Koordinator Ekonomi pada Mei 2008 menyatakan bahwa 40 persen kalangan terkaya menikmati 70 persen subsidi, sementara 40 persen kalangan termiskin hanya menikmati 15 persen dari subsidi tersebut (Mourougane, 2010).

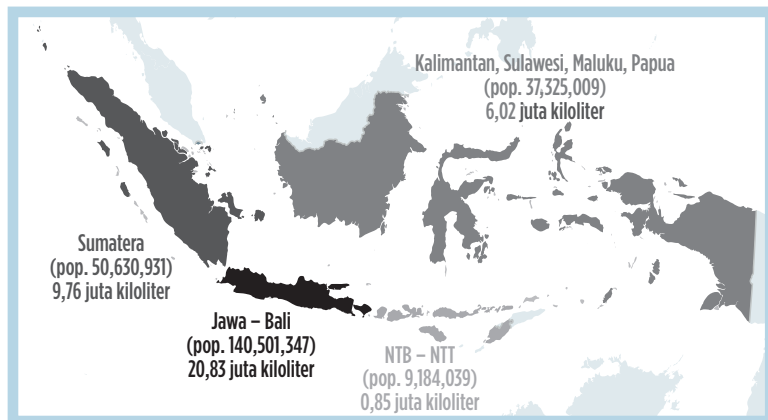
Diagram 5 » Distribusi subsidi bahan bakar di kalangan masyarakat Indonesia



Sumber: Agustina et al., 2008.

Apabila kita berbicara tentang distribusi BBM bersubsidi per wilayah, pada 2009 wilayah yang paling berkembang di Indonesia, Jawa dan Bali, diberikan kuota sebesar 20,38 juta kiloliter atau 55,6 persen dari total BBM bersubsidi.² Wilayah Sumatera mendapat alokasi sebesar 26,1 persen, sedangkan gabungan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mendapat alokasi sebesar 16,1 persen, dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat hanya sebesar 0,02 persen.

Diagram 6 » Alokasi BBM bersubsidi per wilayah



Sumber: BPH Migas (2009).

2.2 Apakah subsidi energi berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi?

Subsidi BBM dapat mempengaruhi ekonomi melalui beberapa cara. Dampak yang sudah terlihat adalah beban pada anggaran negara. Selain itu, masih ada pula dampak-dampak penting lain yang sifatnya lebih sulit untuk diketahui. Dengan merakayasa harga energi supaya lebih murah, subsidi mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan penggunaan yang tidak efisien. Harga yang lebih rendah juga mempengaruhi keputusan penanaman modal, karena hal tersebut menghambat diversifikasi energi dan mengurangi insentif bagi para pemasok energi untuk membangun infrastruktur baru. Dampak penting ekonomi dari pengadaan subsidi bahan bakar dibahas lebih lanjut pada bagian berikut.⁴

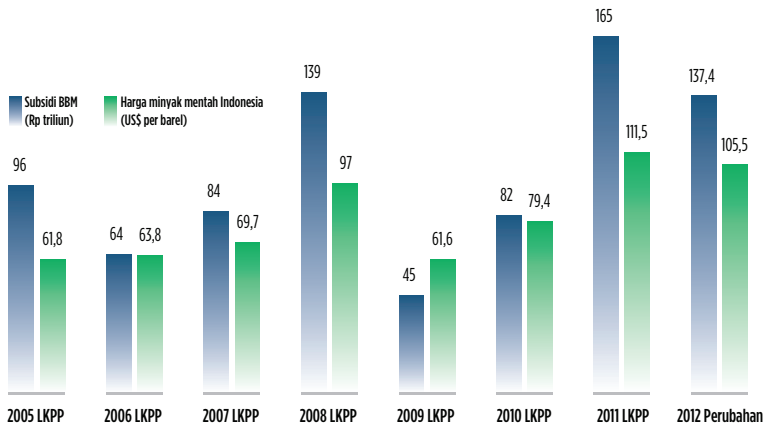
2.2.1 Peningkatan impor energi

Konsumsi energi bersubsidi secara berlebihan mengakibatkan peningkatan permintaan BBM impor dan pengurangan jumlah energi yang diproduksi secara domestik yang ditujukan untuk ekspor. Oleh karena itu, subsidi dapat merusak keseimbangan neraca pembayaran dan meningkatkan ketergantungan suatu negara terhadap impor energi (Mourougane, 2010).

Jurang lebar antara harga BBM bersubsidi dan non-subsidi mendorong konsumen untuk beralih dari BBM non-subsidi Pertamina, atau “Pertamax” (kadar oktan 92), ke “Premium” (kadar oktan 88). Pada kuartal pertama 2011, pemerintah melaporkan bahwa penjualan bahan bakar bersubsidi telah melampaui kuota rata-rata 7 persen, sementara penjualan Pertamax merosot hingga kurang-lebih 11 persen (The Jakarta Post, 2011a; 2011b; Kontan, 2011). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan bahwa kuota 38,5 juta kiloliter Premium pada 2011 akan melebihi hingga 3,5 juta kiloliter (Jakarta Post, 2011c). Kilang minyak Pertamina hanya mampu menghasilkan 10,58 juta kiloliter Premium per tahun, dan, oleh sebab itu, kebutuhan sisanya harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Detik Finance, 2011).

2.2.2 Ketidakstabilan harga minyak dan pembiayaan negara

Diagram 7 » Subsidi BBM dan harga minyak mentah Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan (n.d.a), Kementerian Keuangan (n.d.c)

Catatan: Garis biru untuk “LKPP” merujuk pada laporan anggaran negara yang telah diaudit, sementara untuk “Perubahan” garis biru merujuk pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Subsidi yang besar untuk minyak impor membuat posisi fiskal Indonesia amat rapuh terhadap perubahan harga energi dunia. Ketika harga minyak internasional naik secara drastis, sebagaimana terjadi pada 2008, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM – yang dapat mempersulit keadaan politik dalam negeri dan mengakibatkan inflasi mendadak – atau menaikkan anggaran subsidi, yang dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian.

Jika pemerintah memilih untuk mempertahankan subsidi pada saat harga minyak sedang tinggi, pemerintah harus mencari tambahan hutang, atau memotong pengeluaran untuk program lain. Pasar minyak internasional yang tidak stabil dan ketidakpastian akan kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat menaikkan biaya pinjaman pemerintah, yang akhirnya akan menambah jumlah hutang yang harus dibayar di masa mendatang (World Bank, 2011). Memangkas pengeluaran di bidang infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan juga akan mengakibatkan dampak negatif jangka panjang terhadap pembangunan dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Mengelola dampak fiskal dari fluktuasi harga minyak dunia adalah tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Pada awal 2012, harga minyak mencapai lebih dari US\$100 per barel, padahal anggaran negara pada tahun yang sama menetapkan asumsi harga minyak mentah sebesar US\$90 per barel. Saat ini pemerintah menanggung subsidi yang lebih besar dibandingkan apa yang semula dianggarkan untuk tahun anggaran 2012.

2.2.3 Penanaman modal

Bagi para pemasok energi, seperti fasilitas pengilangan minyak atau pembangkit listrik, harga rendah yang ditentukan oleh pemerintah sama artinya dengan pengurangan insentif untuk melakukan penanaman modal baru. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh harga jual energi yang rendah mengurangi keuntungan para pemasok energi tersebut. Kejadian seperti ini seringkali terjadi di Indonesia ketika subsidi justru membawa akibat buruk terhadap kondisi keuangan perusahaan energi milik negara dan kemampuan mereka guna menanamkan modal di bidang infrastruktur (Mourougane, 2010). Pada 2009, pendapatan penjualan listrik oleh PLN hanya sekitar setengah dari biaya pasokannya (rata-rata Rp650 per kWh dan Rp1.300 per kWh). Kompensasi yang diterima dari pemerintah pusat tidak cukup untuk menutup selisih ini. Akibatnya, PLN tidak mampu melakukan penanaman modal baru, memperluas sambungan listrik di pedesaan, bahkan untuk sekedar melakukan pemeliharaan standar (Mourougane, 2010). Hal di atas menjelaskan tentang minimnya pembangunan kapasitas pembangkit listrik dan sering terjadinya pemadaman listrik.

2.2.4 Persaingan

Harga bahan bakar fosil yang rendah karena direayasa membuat sumber energi alternatif sulit untuk bersaing secara komersial. Sumber alternatif ini memang terlihat memiliki kelebihan dari sudut pandang ekonomi dan lingkungan, namun terpaksa harus kalah karena subsidi yang diberikan kepada sumber energi pesaingnya. Oleh karena itu, subsidi dapat menghambat perkembangan teknologi baru yang lebih menjanjikan daripada teknologi yang ada saat ini.

2.2.5 Korupsi dan penyelundupan

Perbedaan harga antara produk bersubsidi dan non-subsidi dapat menciptakan insentif yang kuat terhadap praktik tidak resmi seperti penyelundupan atau pengalihan bahan bakar kepada pihak yang seharusnya tidak menerima. Produksi bahan bakar fosil adalah bisnis yang sangat menguntungkan yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sangat rentan terhadap penyuapan. Terdapat enam wilayah yang sangat rentan terhadap penyimpangan: rendahnya pembayaran royalti, pemberian lisensi untuk ekstraksi minyak dan gas, penyimpangan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), distribusi keuntungan dalam kontrak bagi hasil, dan eksploitasi kelemahan peraturan dalam skema subsidi baru (GSI, 2010).

Dalam kasus elpiji di Indonesia, perbedaan harga antara elpiji 3 kg bersubsidi dengan elpiji 12 kg non-subsidi mendorong terjadinya pengoplosan isi tangki 3 kg ke dalam tangki 12 kg. Tanpa proses pengisian yang benar, tindakan ini amat beresiko dan telah menyebabkan sejumlah ledakan yang melukai dan membunuh ratusan orang (Kompas, 2010; Kompas, 2011).

Meningkatnya perbedaan harga eceran menyebabkan peningkatan penyelundupan bahan bakar minyak dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara tidak resmi. BPH Migas melaporkan bahwa antara 10 hingga 15 persen bahan bakar minyak bersubsidi yang didistribusikan oleh pemerintah telah dijual secara tidak resmi ke sektor industri, khususnya di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dekat dengan wilayah industri dan pertambangan (Fadillah & Samboh, 2011). Peningkatan penjualan tidak resmi dan penyelundupan bahan bakar ini menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar bersubsidi.

Pengendalian kegiatan ilegal yang terjadi melibatkan biaya administratif untuk mencegah, memantau, dan menindak pelanggaran itu. Dan perlu disadari bahwa beban ongkos tambahan atas hal tersebut ditanggung oleh semua pembayar pajak.



2.3 Apa dampak subsidi energi terhadap lingkungan?

Subsidi energi mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan mengurangi insentif untuk efisiensi energi. Kebiasaan mengkonsumsi bahan bakar fosil secara berlebihan tentunya akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar, polusi udara, dan menipisnya sumber daya alam kita. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional (IEA – International Energy Agency), pemangkasan subsidi konsumsi untuk bahan bakar fosil antara 2011 dan 2020 akan mengurangi emisi CO₂ global sebanyak 5,8 persen, dibandingkan jika konsumsinya dilanjutkan seperti biasa (IEA, 2010). Sementara itu, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD – *Organization for Economic Cooperation and Development*) memperkirakan bahwa pengurangan emisi dapat mencapai 10 persen pada 2050 jika subsidi yang sama untuk konsumsi bahan bakar fosil dapat dihentikan pada 2020 (IEA et al., 2010). Pencabutan subsidi bahan bakar fosil membuka jalan bagi negara seperti Indonesia untuk berkontribusi lebih besar terhadap pengurangan gas rumah kaca tanpa harus menerapkan pajak karbon atau sistem perdagangan emisi. Yusuf, Komarulzaman, Hermawan, Hartono dan Sjahrir (2010), misalnya, menemukan bahwa penghentian subsidi BBM dan listrik akan mengurangi tingkat pengeluaran emisi CO₂ nasional sebanyak 6,71 persen pada 2020 (6,66 persen dari pencabutan subsidi BBM dan 0,92 persen dari pencabutan subsidi listrik).

Penerapan subsidi juga mengurangi insentif untuk melakukan penanaman modal pada sumber energi dan teknologi yang lebih bersih dengan cara merekayasa harga konsumen produk bahan bakar fosil sehingga lebih murah. Melalui cara yang sama, subsidi bahan bakar minyak menghambat penemuan baru dalam produksi dan penyediaan energi lain yang lebih bersih, seperti elpiji dan energi terbarukan lainnya, walaupun sebenarnya Indonesia memiliki sumber energi seperti ini dalam jumlah besar.

Konsekuensi logis konsumsi tinggi bahan bakar fosil adalah terciptanya emisi gas rumah kaca yang lebih besar, polusi udara, dan berkurangnya sumber daya alam.

2.4 Apa rencana pemerintah tentang reformasi subsidi energi?

Pemerintah telah berulang kali menyampaikan rencana untuk melakukan pengurangan subsidi BBM, namun pelaksanaannya sering tertunda. Rencana paling terakhir pemerintah mencakup peningkatan harga bensin bersubsidi sebesar Rp1.500 (US\$0,16) serta pelarangan kendaraan roda empat dan kendaraan milik pemerintah untuk memakai BBM bersubsidi (Braithwaite, et al., 2012). Namun penolakan keras masyarakat pada Maret 2012 memaksa pemerintah untuk menunda rencana untuk menaikkan harga BBM. Rencana pelarangan memakai BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah sementara ini tetap berjalan. Rencana tersebut berlaku efektif pada Mei 2012 untuk kendaraan pemerintah di wilayah Jakarta, dan kemudian diperluas ke wilayah Jawa-Bali pada Agustus 2012.

Subsidi BBM diduga akan mengalami peningkatan pada 2013 seiring meningkatnya konsumsi. Pada 16 Agustus 2012, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) alokasi subsidi BBM dan listrik sebesar Rp274,75 triliun (US\$30 miliar) untuk tahun anggaran 2013 – sebuah kenaikan sebesar Rp72 triliun (US\$7,8 miliar) dari jumlah subsidi yang dialokasikan sebelumnya untuk tahun anggaran 2012 (Sutianto, 2012).

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mencoba untuk mengurangi subsidi listrik dengan menaikkan tarif. Pada Juli 2010 pemerintah meningkatkan tarif listrik sebesar rata-rata 18 persen untuk sebagian besar konsumen PLN, tetapi tidak termasuk 33,6 juta konsumen rumah tangga kecil dengan sambungan 450 dan 900 Volt-Ampere (VA). Walaupun tarif telah dinaikkan, pada 2010, subsidi listrik masih melampaui target sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total subsidi mencapai Rp57,6 triliun (US\$6,4 miliar).⁵

Pada Mei 2011 pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan Tarif Dasar Listrik (TDL) antara 10 hingga 15 persen pada 2012, dengan penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan sebesar Rp15 triliun (US\$1,65 miliar) (Sambon, 2011b).

Untuk tahun anggaran 2013, pemerintah dan DPR telah menyetujui untuk meningkatkan tarif listrik secara bertahap sampai dengan 15 persen hingga akhir tahun yang sama. Kenaikan ini tidak berlaku untuk kegiatan usaha dan rumah tangga sederhana yang menggunakan listrik pada kisaran 450 sampai 900 VA. Penerapan tarif listrik yang lebih tinggi diharapkan mengurangi subsidi listrik sebesar Rp13,92 triliun (Pramudatama, 2012).



Pemerintah juga lebih lanjut mengumumkan perubahan pada model distribusi elpiji 3 kg bersubsidi dari sistem terbuka yang saat ini saat ini berjalan menjadi sistem tertutup pada 2014. Dalam hal ini, pemerintah akan memperkenalkan kartu kontrol untuk mengarahkan distribusi elpiji 3 kg secara lebih tepat kepada keluarga miskin dan usaha kecil. Pembagian kartu kontrol akan didasarkan pada data yang diberikan oleh pemerintah daerah dan beberapa proyek percontohan pemerintah di sejumlah daerah, yang proses uji cobanya telah dilaksanakan pada 2009 dan 2010 (Republika, 2010). Sementara program peralihan minyak tanah ke elpiji dijadwalkan akan berakhir pada 2012, dan tanpa adanya pembatasan subsidi elpiji, pemerintah dapat kembali menghadapi peningkatan beban biaya setelah program tersebut berakhir.

2.5 Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan jika subsidi energi dihapuskan?

Sebagaimana telah disebutkan di atas, manfaat subsidi bahan bakar sebenarnya sebagian besar dinikmati oleh kalangan berpendapatan tinggi, sementara biaya subsidi tersebut harus ditanggung oleh seluruh pembayar pajak. Akibatnya, subsidi bahan bakar merupakan sebuah kebijakan yang regresif, yang membuat masyarakat miskin membayar lebih banyak dan menerima manfaat lebih kecil daripada masyarakat berpendapatan tinggi. Penghentian subsidi akan menghasilkan dampak ekonomi yang positif dalam jangka panjang secara keseluruhan, termasuk bagi kalangan miskin.

Meskipun demikian, penghentian subsidi juga akan menyebabkan dampak negatif jangka pendek terhadap sejumlah kalangan. Model ekonomi yang dikembangkan oleh Clements, Jung dan Gupta (2007), misalnya, menyatakan bahwa pihak yang paling terkena dampak pengurangan subsidi di Indonesia adalah kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena kalangan inilah yang paling banyak mengkonsumsi produk minyak. Kalangan ini kemungkinan besar akan mengurangi konsumsinya dalam jangka pendek agar dapat beradaptasi dengan harga BBM yang meningkat. Wikarya (2012) berpendapat bahwa akan terjadi penurunan daya beli secara keseluruhan di Indonesia karena dampak inflasi dari kenaikan harga barang. Warga miskin adalah yang paling rentan terhadap perubahan ini, terutama mereka yang hidup dengan atau di bawah upah minimum regional. Untuk mengurangi dampak buruk dari reformasi subsidi bahan bakar ini, Wikarya (2012) menyarankan kenaikan harga harus diterapkan secara bertahap dan didukung oleh pengembangan teknologi ekonomi alternatif.

Umumnya kalangan yang tinggal di pedesaan dan berpendapatan rendah mengkonsumsi produk pertanian dalam jumlah besar, yang harganya tidak terlalu rentan terhadap perubahan pada harga BBM. Namun demikian, kaum miskin perkotaan terbukti juga rentan terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar (Clement et al., 2007). Hal ini kemungkinan besar karena, jika dibandingkan dengan kaum miskin pedesaan, kaum miskin perkotaan lebih banyak bergantung pada fasilitas dasar (seperti listrik), dan kegiatan usaha mereka lebih bersifat padat modal (bergantung pada mesin yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar).

Dalam jangka yang lebih panjang, harga minyak yang lebih tinggi tidak akan memberikan dampak negatif kepada kalangan miskin karena hal itu akan dikompensasi oleh manfaat ekonomis dari pengurangan subsidi, yakni ketahanan fiskal yang lebih baik, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan meningkatnya penanaman modal (Clement et al., 2007).



3

**APA YANG KITA
KETAHUI TENTANG REFORMASI
SUBSIDI ENERGI**



3. Apa yang kita ketahui tentang reformasi subsidi energi

Seperangkat kebijakan telah diterapkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, guna mempermudah transisi subsidi bahan bakar. Kesempatan yang paling baik untuk melakukan reformasi (yang dapat didefinisikan sebagai pengurangan jangka panjang dari subsidi dengan dampak negatif yang minimal untuk warga miskin dan masyarakat secara luas) membutuhkan strategi menyeluruh yang meliputi beragam kebijakan pendukung peralihan (Laan, Beaton & Presta, 2010). Penelitian mengenai karakter subsidi, bagaimana beban dan keuntungan didistribusikan dan identifikasi atas kelompok yang paling rentan terhadap dampak pencabutan akan sangat membantu dalam penyusunan strategi reformasi.

3.1 Mekanisme harga dan struktur pajak

Pengurangan subsidi secara bertahap dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi. Badan Kerjasama Internasional Jerman (GIZ – *Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) merekomendasikan agar pemerintah menghindari lonjakan harga lebih dari 10 persen pada setiap langkah penyesuaian yang akan diambil ke depan; Sebagai gantinya, pemerintah seharusnya menerapkan kenaikan-kenaikan kecil secara teratur (misalnya: bulanan), dengan jangka waktu yang jelas (GIZ, 2011). Namun demikian, terdapat juga kemungkinan adanya momentum untuk melakukan perubahan lebih cepat. Jatuhnya harga minyak di paruh kedua 2008 memberikan kesempatan bagi negara-negara di dunia untuk melakukan reformasi subsidi harga, dan momentum tersebut telah dimanfaatkan oleh beberapa negara seperti Cina, Ethiopia dan Vietnam (Kojima, 2009).

Pendekatan bertahap juga diperlukan bagi pemerintah untuk mengembangkan mekanisme harga dan sistem perpajakan energi yang baru, seiring transisi sistem subsidi dari pengaturan harga dengan penyesuaian yang tidak menentu menuju mekanisme harga yang bekerja secara otomatis, dan akhirnya menyesuaikan diri dengan harga dunia disertai kontribusi yang cukup di sektor perpajakan nasional. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengubah kebijakan harga energi dalam situasi yang lebih terkendali.

Tabel 5 dan 6 merangkum pengalaman internasional akhir-akhir ini terkait mekanisme harga dan penyesuaian pajak yang telah digunakan untuk mengelola ketidakstabilan harga di beberapa negara.



Tabel 5 » Beberapa contoh pengalaman internasional dalam penggunaan mekanisme penentuan harga

Cina	Yordania	Afrika Selatan	Turki
<p>Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC, National Development and Reform Commission), selaku pelaksana, mempertimbangkan penyesuaian harga apabila tiga indikator harga minyak mentah naik melampaui 4 persen dalam kurun waktu 22 hari. NDRC memperhitungkan pertimbangan politik, sosial, dan ekonomi. Harga minyak mentah internasional naik sebesar 70 persen selama Januari 2009 dan Oktober 2011, sementara harga BBM naik sebesar 50 persen.</p>	<p>Harga untuk produk minyak naik sebesar 33 persen dan 76 persen sejak 2005 hingga Februari 2008 (pada saat banyak negara secara relatif telah mencapai keseimbangan). Harga dibentuk dengan rumus yang memakai standar harga minyak mentah internasional (Brent). Pengelolaan dilakukan oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan tiga kementerian dan perusahaan pengilangan minyak negara.</p>	<p>Pemerintah menetapkan harga untuk semua jenis bahan bakar minyak, diesel, dan parafin berpondar dengan mekanisme harga yang menyesuaikan diri secara otomatis dan independen, bebas dari intervensi pemerintah baik dengan alasan politik, ekonomi, maupun sosial.</p>	<p>Mekanisme harga otomatis diperkenalkan pada 1998 dan memperbolehkan kilang-kilang untuk mendapatkan keuntungan. Pada 2005 secara penuh menginkuti harga pasar untuk semua sektor dan perusahaan pengilangan dan penyalur minyak negara. Selisih tingkat penyaluran naik 60 persen di dalam 20 bulan setelah kebijakan tersebut.</p>
<p>Pelajaran yang dapat diambil</p> <p>Pemerintah seringkali mempertahankan kontrol politik atas pengaturan harga yang bersifat otomatis.</p>	<p>Subsidi untuk bahan bakar transportasi dihapuskan secara progresif dalam kurun waktu 3 tahun.</p>	<p>Mekanisme otomatis secara luas telah diakui bekerja dengan baik selama bertahun-tahun.</p>	<p>Reformasi mekanisme penentuan harga adalah faktor sangat penting dalam penghapusan subsidi, namun membutuhkan pengawasan agar bekerja secara efektif.</p>
<p>Sumber Government of China (2008); Aizhu (2011)</p>	<p>Baig, Mati, Coady & Ntamatungiro (2007); Arze del Granado, Coady & Gillingham (2010); Ragab (2010)</p>	<p>Department of Energy (n.d.); Baig et al. (2007)</p>	<p>Oguz (2006); Baig et al. (2007)</p>

Tabel 6 » Pegalaman internasional dalam penerapan pajak bahan bakar guna mengelola ketidakstabilan harga

Brasil	Chile	Cina
Pemerintah menstabilkan harga melalui perusahaan minyak negara (Petrobras) dan melalui penyesuaian pajak secara berkala. Pemerintah mengurangi pajak dalam rangka menanggulangi kenaikan harga untuk Petrobras pada 1 November 2011. Pajak bahan bakar umumnya ditentukan di tingkat negara bagian dan hal tersebut penting bagi pendapatan daerah.	Pemerintah menyikapi ketidakstabilan harga dari sistem yang diregulasi yang dialami konsumen dengan pajak (SIPCO) yang ditanggung oleh konsumen. Pajak tersebut tidak memperhitungkan tingkat pendapatan dalam jangka menengah. Besar pajak dihitung dengan membandingkan rata-rata 2 minggu dengan rata-rata 5 bulan.	Pada 2008, China mengambil kesempatan untuk menaikkan pajak secara signifikan pada saat harga minyak internasional jatuh, secara bersamaan menaikkan pajak konsumsi untuk produk minyak dan menghapuskan beberapa tarif dan biaya penggunaan jalan. Pada 2011, ada perubahan dari sistem pajak berbasis volume menjadi berbasis nilai.
Pelajaran yang dapat diambil Pemerintah dapat menyesuaikan pajak sebagai bagian dari kebijakan harga. Sektor pendapatan pemerintah mana yang akan semakin bertambah adalah indikator yang penting.	Pajak variabel dapat diterapkan untuk mendekati kepastian harga. Harga rata-rata selama periode 5-bulan telah menjadi metodologi banyak dipakai dan teruji.	Menurunnya harga minyak dunia membuka kesempatan untuk reformasi. Peninjauan atas sistem pajak secara lebih luas dapat dilakukan secara bersamaan.
Sumber MercoPress (2011); Fick (2011); Rapoza (2011); de Sainte Croix (2012); Villela & Barreix (2003)	OECD (2011)	Government of China (2008); Business Monitor International (2009)

3.2 Meredam dampak sosial dan ekonomi

Mengurangi subsidi energi akan membebaskan anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan yang lain. Dengan mengalokasikan dana-dana ini yang secara lebih tepat pada sektor kesejahteraan sosial dan kegiatan usaha, pemerintah dapat mengeluarkan lebih sedikit biaya untuk secara efektif membantu mereka yang lebih membutuhkan.

Di belahan dunia yang lainnya, banyak upaya reformasi yang berfokus pada bagaimana mengkompensasi kelompok sosial dan usaha, juga untuk meredam dampak kemungkinan inflasi dari pelaksanaan reformasi subsidi (lihat Tabel 7 dan 8).

Tabel 7 » Pengalaman internasional terkait program kompensasi sosial dan ekonomi

Ghana	Iran	Yordania	Malaysia
<p>Saat harga minyak dinaikkan di Ghana pada 2005, pemerintah menyediakan serangkaian skema kompensasi. Skema tersebut meliputi penghapusan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah pertama, meningkatkan jumlah bus, menetapkan patokan maksimum untuk ongkos transportasi umum, menyalurkan dana tambahan untuk program kesehatan di daerah miskin, menaikkan upah minimum harian, melaksanakan program elektrifikasi pedesaan, dan pembelian peralatan dasar untuk pekerja.</p>	<p>Keprihatinan pemerintah mengenai dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap dunia usaha telah mendorong adanya analisis sistematis atas 12.000 perusahaan. Pemerintah merencanakan pemberian kompensasi kepada beberapa sektor terpilih, yang berbentuk, di antaranya: bantuan keuangan langsung dan bahan bakar murah untuk jangka waktu tertentu; pinjaman lunak bagi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan; beberapa jenis bantuan pinjaman; pengurangan tarif administrasi pemerintah dan pajak; dan tunjangan ekspor. Akan tetapi, beberapa dari ukuran ini tidak diimplementasikan.</p>	<p>Paket kompensasi sebesar 7 persen dari PDB diluncurkan dalam periode 2005-2008. Program-program tersebut meliputi: bonus untuk pegawai pemerintah level rendah; bantuan langsung tunai untuk karyawan non-pemerintah dan pensiunan; peningkatan subsidi pangan dan melanjutkan subsidi listrik; proyek untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Penghapusan subsidi diawali dengan melakukan kampanye media yang gencar.</p>	<p>Pemerintah meningkatkan harga BBM pada 2008 sebagai respon dari kenaikan harga minyak dunia. Penyaluran dana tunai disediakan pada nelayan dan pemilik kapal untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM. Potongan harga juga diberikan pada pemilik kendaraan privat dan kendaraan kecil.</p>
<p>Pelajaran yang dapat diambil Sebuah paket kebijakan komprehensif yang dibuat berdasarkan kapasitas yang dimiliki dapat disertakan untuk meredam dampak sosial dan ekonomi.</p>	<p>Dampak terhadap dunia usaha dan pertanian seringkali lebih menjadi perhatian pemerintah. Program peredam khusus dapat dirancang dan diterapkan.</p>	<p>Perusahaan negara dan penyerapan tenaga kerja dapat menjadi kompensasi. Kampanye komunikasi dan media meningkatkan peluang pelaksanaan dan keberlanjutan reformasi.</p>	<p>Pemerintah memiliki pilihan dalam menentukan kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ataukah yang dinilai penting secara politik.</p>
<p>Sumber Coady et al., (2006); Ghana Web (2005); International Monetary Fund (2006) as quoted in Laan, Beaton & Presta (2010)</p>	<p>Guillaume, Zyteck, & Farzin (2011); Hassanzadeh (2012)</p>	<p>Arze del Granado, Coady, & Gillingham (2010); World Bank (2010)</p>	<p>Kojima (2011)</p>

Tabel 8 » Pengalaman internasional dalam penggunaan kebijakan yang dapat mengurangi dampak inflasi

Cina	Iran	Thailand
<p>Kenaikan harga BBM di Cina di 2008 dilaksanakan pada saat harga minyak menurun. Pada 2010 pemerintah tidak melakukan hal yang sama terhadap tarif bus, kereta, dan pesawat udara. Harga tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kenaikan harga BBM dunia pada 2010 dan 2011. Kerugian besar dialami kilang-kilang minyak pemerintah, dan beberapa kilang independen mengurangi produksi, sehingga terjadi kelangkaan dan penimbunan.</p>	<p>Iran meningkatkan harga energi beberapa kali lipat pada akhir 2010. Pemerintah Iran sangat prihatin terhadap kondisi inflasi dan melakukan berbagai instrumen ekonomi dan pasar, di antaranya: melakukan apresiasi terhadap Rial, menimbun barang-barang untuk keperluan sehari-hari dan mendistribusikan bahan pokok kepada publik. Rentang waktu untuk reformasi di saat inflasi sedang rendah (pada pengalaman Iran terjadi sekitar November-Desember).</p>	<p>Pemerintah memperkenalkan transportasi gratis untuk bus non-AC dan kereta kelas ketiga sebagai bagian dari program untuk membantu rumah tangga miskin. Penurunan tarif transportasi publik ini membantu dalam meredam dampak reformasi.</p>
<p>Pelajaran yang dapat diambil Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengintervensi harga akhir dari barang dan jasa, tetapi pemasok dapat mengalami kerugian dan/atau pasokan akan berkurang.</p>	<p>Meskipun mungkin tidak cukup untuk meredam dampak inflasi, sebenarnya tersedia berbagai pilihan kebijakan untuk mengurangi tekanan inflasi.</p>	<p>Pemerintah dapat melakukan intervensi yang sangat terbatas untuk meredam dampak inflasi.</p>
<p>Sumber Government of China (2008); China Daily (2010); Invest in China (2010); Reuters (2011); Bloomberg (2011)</p>	<p>Guillaume, Zytek & Farzin (2011); Nasserli (2012); Bozorgmehr (2012)</p>	<p>Fernquest (2011)</p>

Pada 2005 dan 2008 pemerintah Indonesia menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk meredakan penolakan terhadap naiknya harga BBM, dan membantu keluarga miskin untuk menyesuaikan diri dengan harga energi yang lebih tinggi. Program ini berbentuk pembayaran uang tunai sebanyak Rp300.000 (US\$30) yang diberikan secara langsung pada keluarga miskin (Widjaja, 2009).

Dalam pembahasan mereka mengenai kebijakan BLT di atas, Beaton dan Lontoh (2010) berpendapat bahwa kebijakan tersebut cukup berhasil dalam membantu masyarakat miskin dan meredakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Menurut berbagai kajian yang dilakukan terhadap program BLT 2005, masalah terkait dengan salah sasaran dapat dikatakan rendah, dan sebagian besar kalangan yang berhak menerimanya benar-benar menerima dana yang dijanjikan (Hastuti et al., 2006).

Akan tetapi, sejumlah masalah tetap menyelubungi program ini. Misalnya, selain ditemukan adanya dana yang digelapkan dan ada juga pihak yang berhak namun tidak mendapatkan dana tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan kegelisahan sosial (Cameron dan Shah, 2011). Mereka yang tidak mendapatkan dana yang dijanjikan menyalurkan rasa kemarahan mereka kepada panitia lokal, yang berakhir dengan terjadinya sejumlah kasus kekerasan dan pengunduran diri sejumlah pejabat desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan program BLT di masa depan harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, termasuk kebutuhan untuk memilih sasaran bantuan dengan lebih baik, pengawasan yang lebih kuat, dan dukungan yang lebih besar kepada para pejabat desa.

Pilihan terbaik untuk kebijakan pendukung peralihan akan berbeda dari satu negara ke negara yang lain, bergantung pada kapasitas administratif serta cakupan layanan yang tersedia di negara yang bersangkutan. Bantuan tunai yang terarah mengharuskan teridentifikasinya kalangan miskin yang berhak menerima program bantuan tersebut. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan adanya mekanisme pemberian dana tunai. Tabel 9 membandingkan elemen kunci antara program BLT di Indonesia dengan program serupa di negara lain.

Tabel 9 » Pengalaman internasional tentang pengelolaan penyaluran dana tunai

Komponen Rencana	Indonesia	Iran	Meksiko
Identifikasi dan targeting	<ul style="list-style-type: none"> • Sebuah “<i>proxy means test</i>” dilakukan untuk mengidentifikasi penerima manfaat. • Kemajuan terjadi pada saat penyaluran pertama dilakukan. • Kasus-kasus salah target dilaporkan terjadi selama program berjalan. • Kesalahan (errors) tipe I dan tipe II dilaporkan terjadi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran bersifat universal sehingga tidak diperlukan targeting. • Pada awalnya, ada rencana untuk mengumpulkan data pendapatan rumah tangga, tetapi kegiatan tersebut dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini awalnya hanya digulirkan di daerah miskin, lingkungnya kemudian diperluas secara bertahap. • Menggunakan data sensus sosial-ekonomi dan “<i>proxy means test</i>” untuk menentukan target penerima bantuan.
Jumlah dan frekuensi transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya program mencapai US\$2,3 miliar (tidak termasuk biaya organisasi dan administrasi), sekitar 25 persen berasal dari dana yang dihemat dari pengurangan subsidi. • Dasar pemikiran yang melatarbelakangi besaran jumlah bantuan tidak jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan tentang Reformasi menetapkan setidaknya 50 persen penghematan dari pencabutan subsidi digunakan untuk mengkompensasi kenaikan harga yang dialami rumah tangga. • Presiden memilih untuk membayar US\$37 per bulan (jumlah ini dua kali lebih besar daripada yang disetujui parlemen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya dana yang disalurkan bervariasi tergantung status rumah tangga penerima. • Penyaluran dilakukan setiap dua bulan. • Komponen energi ditambahkan dalam skema pada 2007 sebesar US\$4,60, yang senilai dengan 18,4 persen dari pengeluaran energi dari penerima program Oportunidades.

Bersambung

Tabel 9 » Pengalaman internasional tentang pengelolaan penyaluran dana tunai (bersambung)

Komponen Rencana	Indonesia	Iran	Meksiko
Mekanisme penyampaian	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu kompensasi energi dibagikan untuk mengidentifikasi target penerima bantuan. • Pembayaran dilakukan dalam dua tahap (pada Oktober 2005 dan Januari 2006). Pada 2008, bantuan untuk 7 bulan juga disalurkan dalam dua tahap (Juni-Agustus dan September-Desember). • Penyaluran dana dilakukan secara langsung atau melalui tokoh/pemimpin komunitas. • Kantor pos digunakan untuk menyampaikan dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana kompensasi disalurkan secara langsung ke rekening-rekening bank yang dibuat secara khusus. • Jumlah uang yang disalurkan oleh pemerintah dibekukan hingga tanggal terjadinya kenaikan harga. • Infrastruktur perbankan diperluas dan ditingkatkan untuk melayani penyaluran dana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dana awalnya dilakukan dengan uang tunai melalui pusat-pusat penyaluran khusus. Hal ini berubah sejak 2003, digantikan dengan kartu debit. • Penyaluran dana disalurkan kepada anggota perempuan di dalam keluarga.
Pengawasan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian cepat dilakukan pada 2005 dan 2008 • Ada laporan tentang kasus-kasus penyelewengan dana kepada pihak yang tidak semestinya. • Tidak ada unit yang dibuat khusus untuk menampung keluhan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada model resmi yang dijalankan, namun sepertinya ada upaya proaktif dari pemerintah untuk menanggulangi masalah pada saat masalah tersebut timbul. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya protokol evaluasi independen atas dampak di dalam program <i>Oportunidades</i>. • Peninjauan cepat dilakukan pada setiap tahapan kunci.
Sumber	ASEAN (n.d.); Bacon & Kojima (2006); Cameron & Shahi (2011); Hastuti, et al., (2006); Satriana (n.d.); Widjaja (2009); Kementerian Sosial (2008).	Guillaume, Zytek & Farzin (2011); Bozorgmehr (2012)	Angelucci & Attanasio (2006); Government of Mexico (2010); Niño-Zarazúa (2010); Visa (n.d.); World Bank (2010)

Program BLT di Indonesia merupakan bagian dari serangkaian kebijakan jangka pendek yang disebut sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program-program ini memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat terdampak dengan meningkatkan pembiayaan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan (Beaton dan Lontoh, 2010). Lihat Tabel 10 untuk rangkuman program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung reformasi subsidi BBM pada 2003, 2005, dan 2008.

Table 10 » Program pendukung terkait pengurangan subsidi di Indonesia

	2003	2005	2008
Sektor/Program	1. Bantuan beras untuk rumah tangga miskin; 2. Kesehatan; 3. Sosial; 4. Pendidikan; 5. Agama; 6. Transportasi; 7. Air; 8. Usaha kecil; 9. Pemberdayaan masyarakat pesisir; 10. Pengangguran; 11. Kontrasepsi.	1. Pendidikan (BOS dan BKM); 2. Kesehatan; 3. Infrastruktur pedesaan; 4. Subsidi Langsung Tunai (BLT)	1. Beras untuk rumah tangga miskin; 2. Bantuan tunai (BLT); 3. Tambah subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat; 4. Dukungan biaya pendidikan anak untuk keluarga PNS, tentara, dan polisi berpangkat rendah.
Jumlah dana	Rp4,43 triliun	Rp18,14 triliun	Rp19,3 triliun*

Sumber: Tempo (2003), BPKP (n.d.), Kementerian ESDM (2008).

* Jumlah ini tidak termasuk dana untuk tunjangan biaya pendidikan, sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Pengorganisasian dan pelaksanaan program kompensasi secara efektif adalah sebuah tantangan. Faktor utama dalam penyelenggaraan program kompensasi yang efektif adalah: penentuan sasaran yang baik (atau menentukan kelompok dan individu yang akan disertakan dalam program), pengawasan yang kuat, dan dukungan dari lembaga negara dan komunitas setempat. Program kompensasi dapat menjadi rentan terhadap ketidakefisienan dan korupsi, oleh karena itu mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam program merupakan faktor-faktor yang sangat penting.

3.3 Membangun strategi reformasi

Pilihan langkah yang ditempuh untuk menghapuskan subsidi dapat mempermudah peralihan ke harga pasar dan membangun dukungan publik terhadap usaha reformasi tersebut. Praktik yang baik biasanya mencakup tata kelola, komunikasi, dan pengawasan terhadap dampak pelaksanaan program, yang semuanya merupakan elemen-elemen penting dalam penerapan strategi.

3.3.1 Tata kelola

Tata kelola yang baik penting untuk reformasi subsidi energi. Tanpa adanya tata kelola yang baik, klaim bahwa pengeluaran subsidi akan dikembalikan secara adil dan berimbang akan menjadi kurang kredibel. Pendukung reformasi subsidi seharusnya turut mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan tata kelola energi dan pemerintahan secara umum. Pada saat yang bersamaan, meningkatkan kualitas tata kelola dapat menjadi sebuah proses yang memakan waktu, tahunan atau bahkan hingga puluhan tahun. Jika kita mempertimbangkan limbah dan ketidakefisienan yang terkait subsidi, menunggu hingga masalah tata kelola diselesaikan terlebih dahulu sebelum reformasi subsidi dilaksanakan menjadi sesuatu yang tidak praktis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa beberapa langkah jangka pendek dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas dan menutup peluang terjadinya korupsi.

Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan publik termasuk merupakan elemen kunci dalam penerapan strategi reformasi yang efektif. Jika pemangku kepentingan terlibat dalam proses pengambilan keputusan sejak awal, kecemasan mengenai pelaksanaan reformasi subsidi dapat diketahui dan dijawab sejak dini. Konsultasi juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan untuk melakukan reformasi subsidi.

Pelaksanaan proses reformasi secara bertahap dan kompensasi yang cermat dapat meningkatkan kredibilitas rencana reformasi subsidi secara signifikan. Ketika Iran melakukan reformasi subsidi pada 2010, kompensasi diberikan kepada sekitar 80 persen dari penduduknya. Kompensasi tersebut disalurkan ke rekening-rekening bank yang dibuat sebulan sebelum inisiatif reformasi tersebut dilaksanakan. Warga masyarakat dapat melihat jumlah uang yang masuk di rekening mereka meskipun akses atas uang tersebut dibekukan hingga pada hari reformasi subsidi dimulai (Guillaume, Zytke & Farzin, 2011). Dengan mengorganisasi proses pemberian kompensasi secara baik sebelum kenaikan harga terjadi, pemerintah Iran dengan mudah menunjukkan bukti nyata bahwa janji pemerintah untuk menangani dampak-dampak reformasi akan ditepati.

Keterbukaan adalah hal terakhir yang menjadi kunci dalam peningkatan kredibilitas pelaksanaan reformasi subsidi dan mengurangi korupsi. Adanya informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kebijakan reformasi subsidi dan program kompensasi terkait akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengamati dan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai tujuannya.

3.3.2 Komunikasi

Penyebaran informasi adalah hal penting dari semua strategi reformasi subsidi. Sebagai contoh, pada 2005, pemerintah melancarkan kampanye publik bersamaan dengan pemberian bantuan tunai dan pengeluaran sosial sebagai cara untuk membangun dukungan masyarakat terhadap usaha reformasi tersebut. Tidak seperti sebelumnya, peningkatan harga bahan bakar pada 2005 nyatanya tidak disertai dengan sikap penolakan yang berarti dari masyarakat (Beaton dan Lontoh, 2010).

Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan harga BBM dapat didorong secara teratur dengan cara menerbitkan informasi, seperti survei harga, perbandingan harga domestik dan internasional, daftar harga terdahulu hingga harga saat ini, serta komposisi dari setiap produk minyak bumi utama (seperti harga impor, pengilangan, serta biaya distribusi dan pajak) (Kojima, 2009). Selain itu, pemerintah juga harus mendorong persaingan di sektor eceran dengan mewajibkan SPBU untuk memasang daftar harga pada papan pengumuman.

Kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik akan membantu masyarakat untuk memahami mengapa reformasi diperlukan dan bagaimana uang mereka dapat dialihkan untuk membiayai layanan lain, atau dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pajak yang lebih rendah.

Pada 2012, pemerintah Indonesia membentuk sebuah tim lintas departmen yang diberi nama Tim Nasional Penghematan Pengendalian Penggunaan BBM. Tim ini ditugaskan untuk melakukan pengelolaan strategis dan memantau pelaksanaan reformasi BBM, termasuk mengelola penyampaian informasi kepada masyarakat. Pada waktu itu, pemerintah menggunakan beragam sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, dari memasang spanduk di tempat pengisian BBM, iklan di media cetak, serta acara radio dan televisi. Pesan utama yang ingin disampaikan pemerintah adalah subsidi BBM seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin. Pemerintah juga menyertakan informasi mengenai program kompensasi yang menyertai reformasi subsidi BBM.

3.3.3 Pengawasan dan penyesuaian

Pengawasan dan penyesuaian secara terus-menerus terhadap jalannya penyelenggaraan reformasi subsidi diperlukan guna menilai apakah kebijakan yang telah dilakukan berjalan efektif. Selain itu, pengawasan dan penyesuaian juga penting guna mengetahui kemungkinan adanya konsekuensi negatif yang mungkin saja muncul di tengah penerapan kebijakan reformasi subsidi, dan pemberlakuan penyesuaian kebijakan dari waktu ke waktu (Laan, Beaton & Presta, 2010). Kebijakan bantuan yang bersifat sementara juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai kelompok sasaran, dan tidak berlanjut terlalu lama hingga terlanjur mengakar kuat.

3.4 Kesimpulan

Pengadaan subsidi bahan bakar di Indonesia awalnya dilakukan guna membuat energi lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan miskin. Namun demikian, banyak bukti menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi tersebut – yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp137 triliun (US\$15 miliar) untuk BBM dan Rp65 triliun (US\$7 miliar) pada 2012 – justru dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu. Selain itu, penerapan subsidi seperti ini juga dapat mempengaruhi pasokan energi dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan subsidi energi tidak saja cenderung mengurangi pembiayaan pemerintah untuk penanaman modal di bidang infrastruktur energi (baik terhadap teknologi yang ada saat ini, maupun teknologi yang tengah dikembangkan), tetapi juga membebani sumber daya pemerintah, dan menurunkan daya saing internasional Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia menyadari masalah ini dengan baik, dan telah beberapa kali melakukan sejumlah upaya untuk mencabut subsidi. Pemerintah juga memahami adanya berbagai kebijakan yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat melewati masa peralihan, dan telah menerapkan sebagian kebijakan tersebut. Jadi, apa yang salah dan apakah masih ada harapan untuk menjalankan reformasi ini ke depan?

Pemerintah telah meraih sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan harga energi melalui penggunaan kebijakan peralihan seperti BLT, pengeluaran untuk sektor sosial, penyebaran informasi, dan peningkatan transparansi. Namun demikian, pengurangan subsidi kemudian terganggu oleh peningkatan harga minyak internasional.

Strategi reformasi yang lebih menyeluruh akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih besar. Hal ini biasanya mencakup, antara lain: penelitian untuk mengidentifikasi pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari inisiatif reformasi tersebut, kampanye untuk membangun dukungan publik, kebijakan paket bantuan yang dirancang dan ditargetkan secara cermat, pencabutan subsidi secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dan struktur tata kelola yang baik untuk mengawasi pasar energi yang semakin terbuka.

Bahkan setelah reformasi berjalan sukses sekalipun, subsidi akan terus menjadi kebijakan politik yang populer pada masa tingginya harga minyak, dan, tentunya, kebijakan yang bisa mendapatkan suara rakyat dalam skala besar akan amat menggoda bagi para politisi. Pemerintah Indonesia harus menciptakan suatu rencana guna menolong masyarakat yang rentan tanpa harus menerapkan subsidi. Rakyat Indonesia akan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pasar energi yang lebih terbuka, namun patut disadari bahwa masyarakat juga akan mendapat manfaat dari proses ini melalui penguatan sistem perekonomian, serta lebih banyaknya bantuan yang dapat diberikan kepada rakyat miskin, yang pada akhirnya, akan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi bagi semua pihak.

4. Catatan akhir

¹Rumus harga batubara Indonesia mengacu kepada dua indeks batubara Indonesia yaitu Indeks Batubara Indonesia (ICI) dan Platts, dan dua indeks Australia yaitu NEX dan Global Coal. Keempat indeks harga tersebut dirata-rata pada nilai kalori yang sama untuk menghasilkan Harga Patokan Batubara. Harga Patokan Batubara kemudian digunakan untuk menjadi acuan harga bagi setiap tambang batubara.

²Yang dimaksud alokasi BBM bersubsidi dalam paragraf ini adalah Premium/Bio-Premium, Solar/Bio-Soar dan Minyak Tanah (di luar LPG).

³Bagian ini disarikan dari makalah OECD yang disusun oleh Mourougane (2010).

⁴Kementerian ESDM memperkirakan bahwa subsidi listrik pada 2010 akan mencapai Rp62,8 triliun, sekitar Rp5,2 triliun lebih tinggi dari perkiraan Kementerian Keuangan. Namun demikian, subsidi yang sebenarnya disalurkan hanya dapat diketahui setelah adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pengeluaran negara. (Alfian & Fadillah, 2011).

5. Daftar pustaka

- Agustina, C., Arze del Granado, J., Bulman, T., Fengler, W. & Ikhsan, M. 2008. Black hole or black gold? The impact of oil and gas prices on Indonesia's public finances. World Bank Policy Research Working Paper, No. 4718. Washington. D.C.: World Bank.
- Aizhu, C. 2011, Oktober 8. China to cut fuel prices by 3 pct from record highs. Reuters. Diakses pada: www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_india_guide_rev.pdf
- Angelucci, M., & Attanasio, O. 2006. Evaluating the urban component of Oportunidades. Which methods for which parameters? Berkeley: University of California.
- Arze del Granado, J., Coody, D. & Gillingham, R. 2010. The unequal benefits of fuel subsidies: A review of evidence from developing countries. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- ASEAN. n.d. Country Report of the ASEAN Assessment on the Social Impact of the Global Financial Crisis:Indonesia. Diakses pada: <http://www.aseansec.org/publications/ARCR/Indonesia.pdf>
- Bacon, R., & Kojima, M. 2006. Coping with higher oil prices. Washington D.C. : The World Bank.
- Baig, T., Mati, A., Coody, D. & Ntamatungiro, J. 2007. Domestic petroleum product prices and subsidies: Recent developments and reform strategies. Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Beaton, C. & Lontoh, L. 2010. Lessons learned from Indonesia's attempts to reform fossil-fuel subsidies. Geneva: Global Subsidies Initiative.
- Bloomberg. 2011, April 19. Sinopec Group halts fuel exports to ensure domestic supply. Business Week. Diakses pada: <http://bx.businessweek.com/market-economy/sinopec-group-halts-fuel-exports-to-ensure-domestic-supply/11252424706970622678-1a2fa86b8f79f24381fc5f986e91cba7/>
- Bloomberg. 2012, Agustus, 14. Highest & Cheapest Gas Prices by Country. Diakses pada: <http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-08-13/highest-cheapest-gas-prices-by-country.html#slide62>.
- Bozorgmehr, N. 2012, April 25. Subsidy dispute add to Iran's woes. Diakses pada: www.ft.com/intl/cms/s/0/a6ac4438-8ebe-11e1-ac13-00144feab49a.html#axzz3g0U4gW6
- Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). 2011. Gas Bumi, dan Masa Depan Energi Indonesia, dalam Buletin BP Migas No. 73, Agustus 2011. Diakses pada: <http://www.bpmigas.go.id/wp-content/uploads/2011/08/Buletin-73.pdf>
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 2009. Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Per Propinsi Tahun 2009 (Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 2711/2009). Diakses pada: http://www.bphmigas.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=171:-kuota-volume-jenis-bbm-tertentu-per-propinsi-tahun-2009-berdasarkan-keputusan-menteri-esdm-27112009-&catid=63:kuota-bbm&Itemid=116

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). n.d. Program kompensasi pengurangan subsidi BBM 2005. Diakses pada: <http://www.bpkp.go.id/perekonomian/konten/268/PKPS-BBM.bpkp>

Braithwaite, D., Soelaiman, S., Wiroyudo, G., Trimurdadi, H., Soeleman, S., Utomo, S.P., dan Rakhmanto, P.A. 2010. Ringkasan Eksekutif Harga Sebuah Kebijakan Bahan Bakar Fossil: Subsidi Pemerintah di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, Geneva: Global Subsidy Initiative of the International Institute for Sustainable Development.

Braithwaite, D. Chandra A., Prasetyaning Diah R. L., Indriyanto, A., Lang K., Lontoh L., Siahaan, N., Vis-Dunbar, D., Wattimena, B. A., Widhiantoro, U., dan Wooders, P. 2012. Indonesia's Fuel Subsidies: Action plan for reform. Geneva: Global Subsidy Initiative of the International Institute for Sustainable Development.

Business Monitor International. 2009, Mei. Beijing reneges on fuel price deregulation. Diakses pada: www.oilandgasinsight.com/file/77449/beijing-reneges-on-fuel-price-deregulation.html

Cameron, L. & Shah, M. 2011. Mistargeting of cash transfers, social capital destruction, and crime in Indonesia. Melbourne: Monash University. Diakses pada: http://users.monash.edu.au/~clisa/papers/BLT_JPubE.pdf

Charles, C. 2010, Desember. Corruption and fraud in agricultural and energy subsidies: Identifying the key issues. Policy Brief. Geneva: Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.

China Daily. 2010, Desember 22. China raises gasoline, diesel prices amid inflation pressure. China Daily. Diakses pada: www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_india_guide_rev.pdf

Clements, B., Jung, H-S. & Gupta, S. 2007, Juni. Real and distributive effects of petroleum price liberalization: The case of Indonesia. *The Developing Economies*, 45(2), 220–237.

de Sainte Croix, S. 2012, Oktober 20. Brazil cuts fuel tax as prices rise. Rio Times Online. Diakses pada: www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_india_guide_rev.pdf

Department of Energy of the Republic of South Africa. n.d. Petroleum sources: Fuel price structure. Diakses pada: www.energy.gov.za/files

Detik Finance. 2011, Maret 7. Pertamina terpaksa impor 10 juta kiloliter premium. Diakses pada: Detik Finance: www.detikfinance.com/read/2011/03/07/130419/1585947/1034/pertamina-terpaksa-impor-10-juta-kiloliter-premium

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2011). Fuel price reform in Bolivia. Diakses pada: www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-fuel-price-reform-bolivia-december-2010.pdf

- Dillon, H.S., T. Laan, dan H. Setyaka Dillon. 2008. Biofuels: At What Cost? – Government Support for Ethanol and Biodiesel in Indonesia, Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development, Geneva.
- Ellis, Jennifer. 2009. Untold Billions: Fossil Fuel Subsidies, Their Impact, and Path to Reform, Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development, Geneva.
- Fernquest, J. 2011, Oktober 31. Free water, free electricity, free buses, free trains, cheaper cooking gas, and cheaper gasohol and diesel... and more votes for PPP in the next election? Bangkok Post. Diakses pada: www.readbangkokpost.com/easybusinessnews/government/free_water_free_electricity_fr.php
- Fick, J. 2011, Oktober 28. Brazil's Petrobras raises prices, but won't pinch consumers. Wall Street Journal Diakses pada: <http://online.wsj.com/article/BT-CO-20111028-718418.html>
- Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 2011. Fuel price reform in Bolivia. Diakses pada: www.giz.de/Themen/en/dokumente/giz2011-fuel-price-reform-bolivia-december-2010.pdf
- Government of China. 2008, Desember 19. State Council notice on the implementation of oil price and tax reform. Diakses pada: [www.gov.cn: www.gov.cn/zwgc/2008-12/19/content_1182128.htm](http://www.gov.cn/www.gov.cn/zwgc/2008-12/19/content_1182128.htm)
- Government of Mexico. 2010. Requisitos para acceder al programa Oportunidades. Diakses pada: http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/requisitos_para_acceder_al_programa
- Guillaume, D., Zyteck, R. & Farzin, M. 2011, Juni. Iran: The chronicles of the subsidy reform. Diakses pada: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11167.pdf
- Fadillah, R.D. & Samboh, E. 2011, Juni 1. 15 percent of subsidized fuel sold to industries. Diakses pada: www.thejakartapost.com/news/2011/05/31/15-percent-subsidized-fuel-sold-industries.html
- Harun, Mochamad. 2011, Oktober 4. Peran Pertamina dalam Pemenuhan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. Presentasi pada Media Workshop Antara – International Institute for Sustainable Development – Global Subsidies Initiative.
- Hassanzadeh, Elham. 2012, September. Recent Developments in Iran's Energy Subsidies Reform. Policy Brief. Geneva: Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development.
- Hastuti, Toyamah, N., Usman, S., Sulaksono, B., Budiwati, S., Widyanti, W. D. et al. 2006. A rapid appraisal of the implementation of the 2005 Direct Cash Transfer Program in Indonesia: A case study in five Kabupaten/Kota. Diakses pada: www.smeru.or.id/report/research/blt/slt_eng.pdf
- Index Mundi. n.d.a. Indonesia Crude Oil Production by Year. Diakses pada: <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?country=id&product=oil&graph=production>.

- Index Mundi. n.d.b. Indonesia Crude Oil Consumption by Year. Diakses pada: <http://www.indexmundi.com/energy.aspx?country=id&product=oil&graph=consumption>
- International Energy Agency. 2010. World Energy Outlook 2010. Paris: OECD.
- International Energy Agency, OECD, OPEC dan World Bank. 2010, Juni 26–27. Analysis of the scope of energy subsidies and suggestions for the G-20 initiative. Joint report for the prepared for submission to the G-20 Summit Meeting, Toronto, Canada.
- Invest in China. 2010, April 14. NDRC responsible official answered questions on the oil price adjustment. Diakses pada: http://info.e-to-china.com/investment_guide/77126.html
- Investor Daily Indonesia. 2011, Januari 27. Penghematan dari Konversi Elpiji Ditargetkan Rp35,34 Triliun. Diakses pada: www.investor.co.id/energy/penghematan-dari-konversi-elpiji-ditargetkan-Rp-3534-triliun/4275
- Jakarta Post. 2011a, Maret 22. Pertamina sales down as consumers migrate to Premium: Govt. Diakses pada: www.thejakartapost.com/news/2011/03/22/pertamax-sales-down-consumers-migrate-premium-govt.html;
- Jakarta Post. 2011b, Mei 4. Premium consumption in April exceeds quota. Diakses pada: www.thejakartapost.com/news/2011/05/04/premium-consumption-april-exceeds-quota.html
- Jakarta Post. 2011c, Mei 14. Non-subsidized fuel sales drop 37,65%. Diakses pada: www.thejakartapost.com/news/2011/05/14/non-subsidized-fuel-sales-drop-3765.html
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2012. Pemerintah Rencanakan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg Di Lima Provinsi. April 17, 2012. Diakses pada: <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/5645-pemerintah-renanakan-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-3-kg-di-lima-provinsi.html?tmpl=component&print=1&page=>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2008, Mei 23. Penjelasan Pemerintah Tentang Pengurangan Subsidi BBM dan Kebijakan Lain Yang Menyertainya. Diakses pada: <http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/1754-penjelasan-pemerintah-tentang-pengurangan-subsidi-bbm-dan-kebijakan-lain-yang-menyertainya.html>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 2007. Blueprint program pengalihan minyak tanah ke LPG.
- Kementerian Keuangan. 2010a. Siaran pers Menteri Keuangan No. 221/HMS/2010: Pemerintah membebaskan subsidi atas BBM, bahan bakar nabati dan LPG tabung 3 Kg untuk tahun anggaran 2010.

- Kementerian Keuangan. 2010b. Nota Keuangan dan RAPBN 2011.
- Kementerian Keuangan. n.d.a. Data Pokok APBN 2006 - 2012.
- Kementerian Keuangan. n.d.b. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2012.
- Kementerian Keuangan. n.d.c. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- Kementerian Sosial. 2008. Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, Bantuan Langsung Tuna untuk Rumah Tangga Sasaran dalam rangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
- Kojima, M. 2009, Juni. Government response to oil price volatility: Experience of 49 developing countries. Extractive Industries for Development Series #10. Washington, D.C.: World Bank.
- Kojima, M. 2011. The role of liquefied petroleum gas in reducing energy poverty. Diakses pada: <http://siteresources.worldbank.org/intoGmc/resources/IPGreportWeb-masamil.pdf>
- Kompas. 2012, Maret 15. Jero: Kenaikan TDL Mungkin Ditunda. Diakses pada: <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/15/02152841/Jero.Kenaikan.TDL.Mungkin.Ditunda>
- Kompas. 2011, Februari 16. Ribuan Tabung Elpiji Oplosan Diamankan. Diakses pada: <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/02/16/21061145/Ribuan.Tabung.Elpiji.Oplosan.Diamankan>.
- Kompas. 2010, September 22. Elpiji Oplosan 12 KG Beredar. Diakses pada: www1.kompas.com/read/xml/2010/09/22/12212676/elpiji.12.kg.oplosan.beredar
- Kontan. 2012, Februari 20. Realisasi DMO batubara melebihi target. Diakses pada: <http://industri.kontan.co.id/news/realisasi-dmo-batubara-melebihi-target>
- Kontan. 2011, Mei 4. Harga Pertamina naik, Konsumsi Premium selalu diatas kuota sejak Januari. Diakses pada: <http://lifestyle.kontan.co.id/v2/read/1304503502/66554/Harga-Pertamax-naik-konsumsi-premium-selalu-di-atas-kuota-sejak-Januari>
- Laan, T., Beaton, C. & Presta, B. 2010. Strategies for reforming fossil-fuel subsidies: Practical lessons from Ghana, France and Senegal. Geneva: Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development. Diakses pada: www.globalsubsidies.org/files/assets/strategies_ffs.pdf
- Media Indonesia. 2012, Februari 15. Pertamina Patok Penjualan BBM 57,05 Juta Kiloliter. Diakses pada: <http://www.medaiindonesia.com/read/2012/02/15/298555/4/2/Pertamina-Patok-Penjualan-BBM-5705-Juta-Kiloliter>

MercoPress. 2011, September 28. Brazil adapts to weaker Real: Cuts fuel tax to prop Petrobras and contain inflation. MercoPress South Atlantic News Agency. Diakses pada:

<http://en.mercopress.com/2011/09/28/brazil-adapts-to-weaker-real-cuts-fuel-tax-to-prop-petrobras-and-contain-inflation>

Mourougane, A. 2010. Phasing out energy subsidies in Indonesia. OECD Economics Department Working Paper No. 808. Paris: OECD.

Nasser, I. 2012, April 8. Iran inflation rate at 21.5% in year ending March 19, bank says. Business Week. Diakses pada: www.businessweek.com/news/2012-04-08/iran-inflation-rate-at-21-dot-5-percent-in-year-ending-march-19-bank-says

Niño-Zarazúa, M. 2010. Mexico's Progresa-Oportunidades and the emergence of social assistance in Latin America. Manchester: Brooks World Poverty Institute Working Paper 142.

OECD/IEA dan UNEP. 2002. Reforming Energy Subsidies. Diakses pada:

<http://www.unep.fr/energy/information/publications/other/pdf/En-SubsidiesReform.pdf>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). Inventory of estimated budgetary support and tax expenditures for fossil fuels. Paris: OECD.

Oguz, E. 2006, Desember. Liberalization of the downstream oil industry in Turkey (Master's Thesis).

Diakses pada: www.belgeler.com/blg/12ia/the-liberalization-of-downstream-oil-industry-in-turkey-turkiye-de-rafineri-ve-akaryakit-ve-akaryakit

Pramudatama, R. 2012, September 18. Fuel quota, power hikes get OK. Diakses pada:

<http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/fuel-quota-power-hikes-get-ok.html>

Ragab, A. 2010. Fossil fuel prices in the Arab world and the fear of reform. Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

Rapoza, K. 2011, Mei 12. Brazil govt intervenes on \$6.82 per gallon gasoline prices. Forbes. Diakses pada: www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/05/12/brazil-govt-intervenes-on-6-82-per-gallon-gasoline-prices/

Republika. 2010, Desember 14. 2014, Distribusi LPG 3 kg sistem tertutup se-Indonesia. Diakses pada: www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/12/15/152324-2014-distribusi-lpg-3-kg-sistem-tertutup-se-indonesia

Reuters. 2011, Mei 3. China oil giants ask for oil use tax cut. Reuters.

Sambor, E. 2011, Mei 15. Price may increase 15 percent next year. Diakses pada:

www.thejakartapost.com/news/2011/05/14/price-may-increase-15-percent-next-year.html

- Satriana, S. n.d.. Impact Assessment of the 2008 Unconditional Cash Transfer Programme (BLT) in Indonesia. The Netherlands: Maastricht Graduate School of Governance
- Sutianto, Feby Dwi. 2012, Agustus 16. Subsidi BBM & Listrik di 2013 Capai Rp274,743 Triliun. Detik Finance. Diakses pada: <http://finance.detik.com/read/2012/08/16/213929/1993741/1034/subsidi-bbm-listrik-di-2013-capai-Rp-274743-triliun>
- Tempo. 2003, Januari 27. Dana Kompensasi Subsidi BBM Rp4,430 Triliun. Diakses pada: <http://www.tempo.co/read/news/2003/01/27/0561870/Dana-Kompensasi-Subsidi-BBM-Rp4430-Triliun>
- UNEP. 2008. Reforming Energy Subsidies. Diakses pada: www.unep.org/pdf/pressreleases/reforming_energy_subsidies.pdf
- Villela, L. & Barreix, A. 2003. Taxation in the MERCOSUR and coordination possibilities. Washington D.C.: Inter-American Development Bank.
- Visa. n.d. Bansefi Visa debit and prepaid cards create “Oportunidades” for Mexico’s financially underserved. Diakses pada: http://currencyofprogress.visa.com/wp-content/uploads/2011/12/Empowering_People_Mexico_Case_Study_English_FINAL.pdf
- Widjaja, M. 2009. An economic and social review on Indonesian Direct Cash Transfer Program to Poor Families, Year 2005. Diakses pada: Department of Economics, University of Indonesia: http://umdcipe.org/conferences/policy_exchanges/conf_papers/Papers/widjaja.pdf
- Wikarya, Uka. 2012, Maret 15. Kajian Kebijakan BBM Bersubsidi.
- World Bank. 2011, Maret. Indonesia Economic Quarterly. Diakses pada: <http://issuu.com/worldbank.indonesia/docs/ieq-mar2011-english>
- World Bank. 2010. Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. Washington: The World Bank.
- World Bank. 2007. Spending for Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities. Indonesia Public Expenditure Review 2007, the World Bank, Washington D.C.
- Yusuf, A.A., Komarulzaman, A., Hermawan, W., Hartono, D. & Sjahrir, K.R. 2010. Scenarios for climate change mitigation from the energy sector in Indonesia: Role of fiscal instruments. Working Paper No. 201005. Bandung: Department of Economics, Padjadjaran University.

UCAPAN TERIMAKASIH

Panduan ini adalah hasil kerjasama International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Institute for Essential Services Reform (IESR). Para penulis terdiri dari Fabby Tumiwa, Lucky Lontoh, Tara Laan, Kerryn Lang dan Damon Vis-Dunbar.

Hasil kerja GSI ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan yang tak ternilai dari pemerintah Britania Raya, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Swiss.

Pandangan- pandangan yang diutarakan dalam penelitian ini tidak mencerminkan pandangan para donor GSI, atau terkait dengan para donor yang bersangkutan.

Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD)

International Institute for Sustainable Development (IISD) meluncurkan *Global Subsidies Initiative (GSI)* pada bulan Desember 2005 untuk mengangkat isu terkait subsidi – penggunaan uang publik untuk kepentingan swasta – dan bagaimana hal tersebut menghambat perekonomian dunia menuju pembangunan berkelanjutan. Subsidi adalah instrumen yang amat kuat karena kebijakan ini dapat memainkan peran penting untuk memastikan keterjangkauan barang publik yang tanpa disubsidi akan sulit terjangkau. Akan tetapi, subsidi juga dapat diselewangkan. Kepentingan para pelobi dan ambisi pemilu para pemegang jabatan dapat membajak kebijakan publik. Oleh karena itu, GSI mulai dari satu dasar pikiran bahwa transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi dasar setiap program subsidi.

Masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena, meskipun subsidi adalah instrumen sah kebijakan publik, kemanjuran subsidi – kemampuannya untuk mencapai tujuan – masih harus dibuktikan. Apa yang sering terjadi adalah konsekuensi yang muncul kerap tidak diharapkan dan diperkirakan sebelumnya, sehingga manfaat kebijakan subsidi tidak mampu mencapai potensinya. Sementara itu, warga negara yang membayar pajak tetap tidak memahami kenyataan yang berkembang mengenai subsidi.

Ketika subsidi menjadi penyebab utama munculnya sistem perdagangan yang tidak adil dan akar perusakan lingkungan, pertanyaan yang perlu diangkat adalah: apakah ini cara yang diinginkan para pembayar pajak untuk menghabiskan uang mereka? Dan apakah mereka perlu, melalui pajak yang mereka bayarkan, mendukung hasil yang tidak produktif semacam ini? Penghapusan subsidi yang salah sasaran dan merusak dapat menghemat dana pemerintah dan memungkinkan alokasi dana tersebut ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Tantangan GSI kepada para pendukung subsidi adalah mereka harus dapat membuktikan bahwa subsidi dapat berdampak positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi secara berkelanjutan – dan harus pula menjamin bahwa semua hal tersebut tidak mengganggu peluang pembangunan para produsen termiskin di dunia.

Untuk mendukung semua hal ini, GSI bekerjasama dengan jejaring mitra peneliti dan media yang semakin berkembang untuk menjelaskan dampak buruk dan baik dari penerapan kebijakan subsidi; mendorong adanya perdebatan dan kesadaran publik tentang pilihan apa saja yang sebenarnya masih tersedia; dan membantu memberikan para pembuat kebijakan dengan alat kebijakan yang dibutuhkan guna menjamin hasil yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat dan bumi kita.

www.globalsubsidies.org

GSI adalah sebuah inisiatif dari IISD. Dibentuk pada 1990, IISD merupakan sebuah organisasi nirlaba yang dijalankan oleh tim yang terdiri dari 150 orang dengan beragam latar-belakang dan berlokasi di lebih dari 30 negara. GSI berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan bekerjasama dengan banyak mitra di berbagai belahan dunia. Donatur utama GSI termasuk pemerintah Denmark, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Britania Raya. William and Flora Hewlett Foundation juga turut berkontribusi dalam mendanai penelitian dan kegiatan komunikasi GSI.

Untuk informasi lebih lanjut silakan kontak Kerryn Lang di alamat surat elektronik: klang@iisd.org atau info@globalsubsidies.org atau +41.22.917.8920

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang mempromosikan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan untuk pembangunan manusia. IESR dirancang sebagai sebuah lembaga pemikir untuk mempromosikan kebijakan publik, alternatif dalam rangka mendorong terpenuhinya kepentingan publik, serta memperkuat tata kelola dalam isu energi, ketenagalistrikan, perubahan iklim, dan industri ekstraktif, dengan tujuan untuk memastikan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk memberikan manfaat publik yang sebesar-besarnya, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial. IESR menggabungkan kajian dan penelitian, dengan intervensi aktif untuk terjadinya perubahan kebijakan dan regulasi, kampanye publik, dan pengembangan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil.

**Alamat: Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-13 Jakarta, 12790, Indonesia. Tel: +62-21-7992945 Fax: +62-21-7996160
Email: iesr@iesr.or.id Website: www.iesr-indonesia.org**



GSI Global
Subsidies
Initiative



iisd International
Institute for
Sustainable
Development Institut
international du
développement
durable